

**PENGEMBANGAN *MUSLIM FRIENDLY TOURISM*
DALAM KONSEP PARIWISATA BUDAYA
DI PULAU DEWATA**

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Diajukan untuk Mendapat Bantuan Dana dari BOPTAN UIN Sunan Gunung
Djati Bandung Tahun Anggaran 2019



Oleh:

Dr. Ujang Suyatman, M. Ag.	NIP. 197110061999031005
Dr. Ruminda, M. Hum.	NIP. 198107102006042003
Ika Yatmiksari, S.S., M.Pd.	NIP. 198204052006042002

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2019

Abstrak

Industri halal telah menjadi kecenderungan ekonomi global saat ini, demikian halnya dengan pariwisata halal sebagai salah satu sektornya. Perkembangan pariwisata halal mengiringi trend gaya hidup umat Islam sebagai dampak peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat di negara-negara Islam, terutama negara-negara Timur Tengah. Indonesia, dengan beragam potensi yang dimiliki, terus mengembangkan sektor ini untuk menjadi yang terbaik di dunia. Berbagai wilayah ditawarkan sebagai destinasi pariwisata halal, tidak terkecuali Bali.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan respon *stakeholders* kepariwisataan di Pulau Bali terkait wacana-wacana penerapan konsep pariwisata halal di Pulau Dewata itu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara triangulasi, yaitu saling mempertautkan informasi dari berbagai sumber atau antar teknik. Hasil analisis data kemudian ditafsirkan dan disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa secara umum *stakeholders* pariwisata di Bali menolak Bali untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata dengan konsep pariwisata halal. Alasan utama penolakan-penolakan itu terkait dengan keberlangsungan atau *sustainability* pariwisata Bali yang terkenal dengan konsep pariwisata budayanya. Tujuan wisatawan adalah untuk mengunjungi destinasi, sedangkan wisata halal hanyalah pilihan atau *extend service* bagi pelaku bisnis untuk menyiapkan segala kebutuhan wisatawan Muslim, terutama kehalalan makanan dan kemudahan tempat shalat. Layanan-layanan itu sudah menjadi hal biasa, karena Bali menjadi tempat yang ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Karena itu, Bali lebih pantas menjadi destinasi pariwisata ramah Muslim (PRM), tapi tidak mengusung konsep pariwisata halal.

KATA PENGANTAR

Boming halal life style sebagai dampak positif membaiknya perkembangan perekonomian negara-negara Muslim, terutama negara-negara di Timur Tengah, telah membangkitkan gairah industri perdagangan global dalam menawarkan produk-produk halal. Produk-produk itu tidak saja berupa produk pangan halal, tetapi juga merambah sektor-sektor perdagangan lain seperti pakaian, pengobatan atau kesehatan, transportasi, jasa keuangan, hingga yang sedang trend akhir-akhir ini yaitu industri pariwisata global.

Sejumlah negara yang menjadikan industri kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan devisanya berlomba-lomba untuk menarik sebanyak mungkin jumlah kunjungan wisatawan Muslim. Tidak saja negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang meramaikan ‘persaingan’ itu, tetapi juga negara-negara dengan penduduk Muslim yang minoritas seperti Jepang, Korea, Thailand, dan sejumlah negara di Eropa.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk merebut segmen pasar pariwisata halal itu, sejak tahun 2014 terus berbenah mengembangkan sektor pariwisata ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia, dari mulai pengembangan obyek-obyek wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, hingga pengembangan infrastruktur terutama akses jalan yang dapat menjangkau daerah-daerah potensial dalam menemukan obyek-obyek wisata baru. Di

samping itu, juga dilakukan upaya *extend product* atau pengembangan obyek atau destinasi wisata yang telah ada melalui pelabelan halal atau menawarkan layanan halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan,

Sejumlah daerah potensial ditawarkan pemerintah Indonesia, dan sebagiannya telah berbenah diri untuk mengembangkan sektor industri ini, seperti provinsi Aceh, Lombok, Gorontalo, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Di antara daerah-daerah tersebut bahkan ada yang telah menjadikan wisata halal sebagai ikon kepariwisataannya dan menjadi destinasi utama wisata halal di Indonesia, seperti Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kerja keras kementerian pariwisata Republik Indonesia telah menuai hasil yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2016

Pulau Bali, sebagai pintu utama pariwisata Indonesia dan destinasi yang sudah sangat terkenal dalam percaturan pariwisata global, tidak terluput dari isu yang sedang menggejala ini. Wacana untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata halal pun berkembang, terutama ketika isu-isu tersebut dijadikan komoditas politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2018. Pro-kontra atas wacana itu pun mengemuka.

Sebagian pihak, terutama pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata di Bali menolak wacana tersebut. Penolakan itu bukan dilatari isu-isu agama, di mana Bali merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu, sedangkan istilah halal merupakan istilah yang khas Islam. Kebanyakan penolakan itu lebih didasarkan pada kepentingan bisnis, bahwa konsep pariwisata yang dikembangkan di Bali selama ini adalah wisata Budaya. Konsep wisata budaya menjadi branding

pariwisata Bali dan yang menjadikannya terkenal sehingga menjadi destinasi utama wisata di Indonesia.

Sebagai sebuah konsep bisnis, wisata halal bukan tentang agama atau keyakinan, Ia adalah salah satu segmen pasar pariwisata yang mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan wisatawan Muslim selama mereka melakukan kunjungannya, terutama terkait layanan makanan halal dan ketersediaan sarana ibadah shalat. *Extend service* tersebut bukan merupakan masalah baru bagi pengusaha bisnis wisata mengingat Bali yang sudah terbiasa menjadi tujuan wisatawan dari berbagai bangsa dan kelompok agama, termasuk wisatawan Muslim. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Pulau Dewata ini telah mendorong sejumlah pelaku bisnis untuk mengembangkan produknya dalam segmen halal tersebut sebagai *extend service*, namun tidak harus menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata halal. Penyebutan Bali sebagai pariwisata ramah Muslim (*Muslim friendly tourism*) dengan tetap mengusung konsep Pariwisata Budaya lebih diterima oleh sejumlah stakeholders pariwisata di Pulau Dewata ini.

Bandung, Oktober 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Organisasi Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Pariwisata	11
2.2 Konsep Pariwisata Halal	15
2.2.1 Pengertian Pariwisata Halal	18
2.2.2 Pariwisata Berbasis Agama	20
2.2.3 Kebutuhan Wisatawan Muslim	22
2.3 Pariwisata dalam Perspektif Islam	
2.3.1 Konsep Halal	25
2.3.2 Konsep Pariwisata dalam Al-Quran dan Sunnah	28
2.3.3 Dorongan Agama untuk Melakukan Perjalanan	33
2.4 Potensi Pariwisata Halal di Indonesia	37
2.5 Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian	50
3.2 Metode dan Pendekatan Penelitian	
3.2.1 Metode Penelitian	51
3.2.2 Pendekatan Penelitian	53
3.3 Instrumen Penelitian	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.4.1 Wawancara	56
3.4.2 Observasi	58
3.4.3 Studi Dokumentasi	60
3.5 Teknik Analisis Data	61
3.5.1 Reduksi Data	62
3.5.2 Display Data	63
3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	63

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA	
4.1 Konsep dan Perkembangan Kepariwisata Bali	
4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Bali	65
4.1.2 Pariwisata Budaya dalam Bingkai <i>Trihita Karana</i>	68
4.1.3 Sejarah dan Perkembangan Kepariwisata di Bali	79
4.2 Respons Kepariwisata Bali terhadap Wacana Pariwisata Halal	90
4.3 Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim di Bali	
4.3.1 Konsep Pariwisata Ramah Muslim di Bali	103
4.3.2 Destinasi Wisata Ramah Muslim di Bali	106
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Komponen Kesiapan Destinasi Wisata Syariah	40
4.1	Komposisi Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Provinsi Bali Hasil Sensus Penduduk 2010	66
4.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali Menurut Kebangsaan, 2014-2018	95
4.3	Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Bulan dan Kelas Hotel di Bali, 2018	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1	Potensi dan Peluang Wisata Halal Global	38
2.2	Destinasi Wisata Syariah di Indonesia	40
4.1	Pengrajin Handmade Patung Kayu di Desa Mas, Ubud – Bali	69
4.2	Unsur-unsur Arsitektur Bali	70
4.3	Tari Pendet, Kesenian Khas Bali	71
4.4	Upacara Keagamaan di Pura Tanah Lot, Bali	73
4.5	Menyajikan Canang Sari	76
4.6	Perkembangan Pariwisata Bali sebagai Turismemorfosis	82
4.7	Hotel The Rhadana Kuta	107
4.8	Cafe dé Dapoer di The Rhadana Kuta	108
4.9	Bayt Kaboki Hotel	109
4.10	Mushala di Bayt Kaboki Hotel	110
4.11	Bali Nusa Dua Hotel	111
4.12	Masjid Nurul Huda, Tuban, Kuta-Bali	114
4.13	Masjid Agung Ibnu Batutah, Puja Mandala	116
4.14	Masjid Agung Palapa di Kawasan Dreamland Beach	119
4.15	Masjid Al-Qomar, Simbol Menyama Braya Antarumat Beragama	121
4.16	Masjid Assyuhada Kampung Bugis Pulau Serangan	124
4.17	Masjid Baiturrahman, Kecicang, Karangasem-Bali	127
4.18	Masjid Nurul Huda Kampung Gelgel	128
4.19	Kesenian Tari Rudat di Kampung Gelgel	129
4.20	Kain Tenun Endek Khas Bali	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata Indonesia, yang melakukan promosi besar-besaran untuk menarik minat wisatawan melalui program promosi pariwisata bertema Pesona Indonesia (*Wonderful Indonesia*). Menurut UU No. 10 Tahun 2009, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Sejalan dengan berkembangnya industri-industri di bidang pariwisata, pemerintah Indonesia juga mencoba mengencarkan sisi pariwisata dengan daya tarik lain, yaitu yang berhubungan dengan sisi keagamaan. Setelah dikembangkannya jenis wisata religi, yang menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi, dengan objek wisata berupa masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai

religi, ziarah dan lain-lain, kemasan wisata lain dengan konsep keagamaan juga tengah gencar dipromosikan. Konsep wisata ini dilabeli dengan nama wisata halal (*halal tourism*). Jika wisata religi lebih mengedepankan aspek lokasi atau objek dan sejarah tempat wisata, maka wisata halal lebih mengedepankan aspek pelaku atau wisatawananya. Wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas. Wisatawan tidak hanya berkunjung ke lokasi-lokasi religi namun juga lokasi-lokasi umum yang memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para wisatawan Muslim untuk tetap menjaga ketentuan-ketentuan agamanya.

M. Battour dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh seorang Muslim dalam industri pariwisata. Definisi ini memandang hukum Islam (*syariah*) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah Muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran halal dan perjalanan halal. Menurut definisi ini, lokasi kegiatan tidak terbatas di negara-negara Muslim semata, tetapi juga mencakup produk dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim baik di negara Muslim maupun negara non-Muslim. Selain itu, definisi ini memandang bahwa tujuan perjalanan tidak harus bersifat keagamaan. Jadi perjalanan bisa dengan motivasi wisata umum namun dengan merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga

memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat, tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain (Jaelani, 2017:7). Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam (Diyanat Isleri Baskanlig, 2011). Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, 2011). Sebagai konsekuensi yang tumbuh dari pasar terkait konsumsi yang halal, maka demografi konsumen Muslim memfokuskan pada ketentuan ini.

Dengan adanya perluasan konsep 'halal' tersebut, istilah wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menjelaskan bahwa, "wisata halal

merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umrah dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim” (Wuryasti, 2013).

Sejalan dengan *Booming Global Halal Market*, Industri Pariwisata Dunia beberapa dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang fenomenal. Pasar Pariwisata Halal termasuk 5 besar pasar pariwisata dunia. Dengan pengeluaran turis Muslim menurut Thomson Reuters SGIE Report 2017/2018 di tahun 2016 mencapai US\$ 169 miliar dengan tingkat pertumbuhan 6,3% per tahun jika dibandingkan dengan pengeluaran turis dari Tiongkok di tahun yang sama sebesar US\$ 179 miliar dengan tingkat pertumbuhan 3,5% per tahun, pasar Pariwisata Halal adalah termasuk 3 besar sumber wisatawan dunia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki 88% populasi Muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta mega biodiversity, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal. Didukung pula oleh tingkat pertumbuhan Pasar Pariwisata Halal yang pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan Muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% (*rate of growth forecast*) sejak tahun 2014. Menyadari potensi ini, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan *Wonderful Indonesia* sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia.

Menurut Arief Yahya (Djakfar, 2017: v), Pariwisata Halal terbagi ke dalam dua terminology atau pendekatan. *Pertama*, adalah pendekatan secara umum yang masih beranggapan bahwa Pariwisata Halal merupakan Wisata Religi. *Kedua*, yang beranggapan bahwa Pariwisata Halal adalah sama seperti pariwisata pada umumnya hanya menyiapkan *extended service* (layanan tambahan) bagi wisatawan Muslim. Secara generik, Pariwisata Halal di antaranya adalah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dalam bingkai wisata keluarga (*halal lifestyle*). Berdasarkan perluasan definisi ini, pariwisata halal dapat dikembangkan di wilayah manapun di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang penduduknya bukan mayoritas Muslim, seperti Papua dan Bali.

Sebagai destinasi pariwisata utama Indonesia, Pulau Bali tidak lepas menjadi sorotan yang kerap diwacanakan dengan gagasan pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Gagasan mengembangkan pariwisata Bali sebagai wisata halal terutama ramai dibicarakan pada tahun 2019 karena dilontarkan oleh Sandiaga Uno sebagai seorang kandidat wakil presiden saat itu. Gagasan ini melahirkan beragam tanggapan, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun pelaku industry wisata. Tanggapan yang setuju dan tidak setuju telah mewarnai gagasan tersebut.

Menurut I Wayan Nuka Lantara (www.balipost.com), paling tidak terdapat dua argumen besar yang mendasari ide tersebut. *Pertama*, kesuksesan wisata Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, yang dikenal toleran dan sesuai (ramah) terhadap wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia dengan latar belakang budaya masing-masing yang berbeda-beda, termasuk untuk wisatawan dari

negara-negara Timur Tengah. *Kedua*, beberapa negara lain seperti Thailand dan Jepang juga sudah membuka diri sebagai destinasi wisata halal, dengan menyediakan layanan dan infrastruktur yang sesuai dengan syarat-syarat objek wisata halal. Di samping itu, pusat investasi berbasis syariah yang perkembangannya bahkan mengalahkan potensi di negara-negara pusat bisnis syariah di Timur Tengah, justru adalah London (Inggris) dan Malaysia. Namun demikian, ide yang disertai argumen tersebut justru sebagian besar memperoleh penolakan dari masyarakat dan pelaku industri pariwisata di Bali.

Menurut Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau sering disapa Cok Ace, konsep pariwisata halal tidak sesuai dengan potensi, karakter, serta branding pariwisata Bali yang selama ini telah mendunia. Jika konsep itu dipaksakan, malah akan menyebabkan kemunduran pariwisata Bali. Karakter pariwisata di Bali dikenal dengan pariwisata budaya dan juga dikenal dengan kearifan lokal masyarakat Bali, serta secara filosofis dilandasi oleh ajaran Hindu (www.tagar.id).

Senada dengan pernyataan Cok Ace di atas, I Nyoman Sukma Ariada, Wakil Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali, menegaskan bahwa pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai Hindu Bali yang sudah lekat dengan filosofi *Tri Hita Karana*, sebagaimana tertuang dalam Perda Pariwisata Bali. Oleh karena itu, tidak bisa dipaksakan ada wisata halal di Pulau Dewata (travel.detik.com).

Namun demikian, I Nyoman Sukma mengatakan, bahwa tanpa embel-embel halal pun, Bali dinilai sudah ramah pada turis muslim. Dia menyontohkan sangat mudah mencari masjid ataupun restoran halal di Pulau Dewata. Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, AA Gede Yuniartha Putra. Menurutnya, Bali memang bukan wilayah mayoritas Muslim, namun tetap menarik untuk dikunjungi wisatawan Muslim. Bali menjadi *Muslim Friendly Tourism*, meski tidak dilabeli dengan destinasi pariwisata halal dunia (republika.co.id/berita/gaya-hidup...)

Pernyataan Gede Yuniartha tersebut cukup beralasan. Pulau Bali, meskipun mayoritas penduduknya non-Muslim, namun dapat dijadikan tujuan wisata umat Islam tanpa merasa khawatir baik dalam hal beribadah maupun kebutuhan akan makanan serta minuman yang halal. Beberapa contoh tujuan wisata di Bali yang dapat dikategorikan sebagai objek wisata yang *Muslim-friendly*, di antaranya adalah Desa Candi Kuning, Bedugul, yang memiliki komunitas Muslim kuno; Ubud, Jimbaran, Sanur yang banyak menawarkan wisata kuliner halal; Kampung Gelgel yang memiliki masjid tertua di Bali dan pertunjukan adat tari *Rudat* yang menggambarkan sejarah perkembangan awal umat Islam di Bali. Di samping itu, untuk kebutuhan akomodasi, beberapa hotel di Bali telah menyatakan dirinya sebagai hotel syariah, di antaranya Hotel Grand Santhi, Grand Zurri Hotel, Winna Holiday, Bayt Kaboki, The Harmoni Legian, Radhana Hotel, Goodway Hotel and Resort, Nirmala Hotel, Puri Nusa Indah Sanur, dan Nusa Dua Beach Hotel.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji respons Kepariwisata di Pulau Bali terhadap wacana wisata halal yang sedang melanda pariwisata dunia

saat ini. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan mengkaji potensi-potensi *Muslim Friendly Tourism* (MFT) yang dikembangkan industri pariwisata di Bali, serta respons wisatawan Muslim terkait Bali yang ramah Muslim sebagaimana gagasan di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, terdapat sebuah keunikan yang menarik untuk dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Di satu sisi, Bali tetap mempertahankan identitas kepariwisataannya, namun di sisi lain Kepariwisata di Pulau Bali memberikan respons positif atas perkembangan wisata halal yang menggejala dalam industri pariwisata dunia saat ini. Oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pariwisata yang dikembangkan Kepariwisata Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah respons Kepariwisata Provinsi Bali terhadap wacana pengembangan pariwisata halal di Pulau Bali?
3. Bagaimanakah pengembangan *Muslim Friendly Tourism* di Pulau Bali seiring *booming* pasar halal global?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan:

1. Konsep Kepariwisata yang dikembangkan industri pariwisata di Pulau Bali

2. Respons Kepariwisata Pulau Bali terhadap isu-isu pariwisata halal yang berkembang saat ini
3. Pengembangan destinasi-destinasi *Muslim Friendly Tourism* di Pulau Bali seiring *booming* pasar halal global

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal. *Pertama*, secara teoritis penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan konsep pariwisata syari'ah, terutama terkait dengan penyediaan komponen-komponen kepariwisataan yang ramah terhadap wisatawan Muslim. *Kedua*, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran *best practice* pengembangan industri kepariwisataan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pariwisata halal menjadi segmen pasar yang mulai dikembangkan di beberapa daerah/provinsi di Indonesia, antara lain di Jawa Barat. Sehingga dengan adanya gambaran mengenai pengembangan komponen-komponen kepariwisataan yang menjadi tuntutan bagi layanan wisatawan Muslim yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lain untuk dapat mengembangkannya secara lebih baik lagi. Dengan cara itu, harapan Indonesia dengan berbagai potensi yang dimilikinya untuk menjadi kiblat wisata halal dunia dapat segera terwujud.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab II memaparkan kajian teori yang digunakan dalam pembahasan masalah-masalah penelitian dan dilengkapi dengan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya dikembangkan tentang kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam pembahasan masalah-masalah penelitian yang diajukan.

Bab III membahas tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Pembahasan tersebut meliputi lokasi dan subyek penelitian, desain dan jenis/metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik-teknik pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis data guna mendapatkan jawaban atas permasalahan/pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

Bab IV menguraikan tentang data yang ditemukan di lokasi penelitian disertai pembahasan/analisis data sesuai teori yang telah dikemukakan. Sedangkan bab V berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi untuk penerapan dan atau pengembangan hasil penelitian ini. Juga untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pariwisata

Pariwisata, yang secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, merupakan konsep yang tersusun atas dua suku kata: “pari” dan “wisata”. *Pari* memiliki arti: banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan lengkap. Sedangkan *wisata* berarti: perjalanan, bepergian (Fuad, 2014). Dengan demikian, pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan bepergian ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggal asal; atau suatu tempat tujuan wisata/perjalanan yang berkali-kali dikunjungi oleh seseorang atau oleh orang-orang yang berbeda; atau sebuah perjalanan yang dilakukan berputar-putar mengitari destinasi-destinasi atau obyek-obyek wisata di tempat tujuan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “*tour*” (Machfudz, 2017). Dengan perjalanan yang berputar-putar tersebut, seseorang yang melakukan perjalanan dapat mengenali tempat yang didatanginya secara lengkap. Sinaga (2010: 12) mengatakan, pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individual atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.

Dinyatakan oleh Mill dan Morrison (1998: 2), bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadi ketika seseorang menyeberangi perbatasan internasional untuk liburan atau bisnis dan tinggal setidaknya 24 jam tetapi kurang dari satu tahun. Chadwick (1994: 66) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan orang di luar

lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan perjalanan utamanya untuk rekreasi atau liburan selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di tempat yang dikunjungi.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dikatakan, bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pengertian tersebut meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal, pengembangan daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya), usaha dan sarana wisata, seperti usaha jasa, biro perjalanan, pramuwisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Dengan demikian, pariwisata adalah konsep yang rumit mencakup berbagai pertimbangan sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Medic &

Middleton (1973) menegaskan bahwa konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, dan manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para turis. Buhalis (2000: 98) meyakini bahwa tujuan wisata memiliki lima unsur penting, yaitu atraksi, akses, fasilitas, kegiatan, dan berbagai hal yang terkait sisi jasa pariwisata.

Banyak negara yang menggantungkan sumber pajak dan pendapatan wilayahnya dari industri pariwisata, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karenanya, dilakukanlah usaha-usaha untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah kunjungan wisata guna meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang ke tempat tersebut.

Menurut Arief Yahya dalam Djakfar (2017: 4), pariwisata bagi Indonesia merupakan penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling mudah dan murah. Selain itu menurut SICTA-WTO (*Standard International Classification of Tourism Activities-World Trade Organization*), Pariwisata memberikan dampak ekonomi yang besar mencakup 185 kegiatan usaha yang sebagian besarnya dalam jangkauan UKM. Oleh karena itu, dalam era Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, pariwisata telah ditetapkan sebagai *leading sector* pengembangan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2016, pariwisata berada di posisi kedua terbesar sumber penerimaan devisa negara setelah CPO, dan sektor ini diproyeksikan akan menempati posisi pertama terbesar pada tahun 2019.

Pariwisata terdiri atas beberapa jenis. Salma dan Susilowati (2004:155-156, yang dikutip dari Spillane, 1989 dan Badrudin, 2000) membedakan jenis pariwisata ke dalam enam jenis, yaitu:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan berlibur, *refreshing*, untuk mengendorkan ketegangan syaraf, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, dan sebagainya.
2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation sites*), yakni pariwisata yang dilakukan demi memanfaatkan hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani, dan sebagainya.
3. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat dan cara hidup masyarakat negara lain, dan sebagainya.
4. Pariwisata untuk olahraga (*sports tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan untuk olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahraganya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktikkannya sendiri.
5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (*business tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan.
6. Pariwisata untuk konvensi (*convention tourism*), yakni pariwisata yang ditujukan untuk melakukan konvensi atau konferensi.

2.2 Konsep Pariwisata Halal

Dewasa ini sektor ekonomi berbasis Islam menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian global mengiringi evolusi industri halal yang melanda berbagai negara di dunia. Perkembangan itu sendiri berawal sektor makanan dan minuman yang kemudian meluas ke sektor keuangan pada tahun 1970-an disebabkan *booming* petrodollar, yaitu melesatnya bisnis minyak dan gas bumi khususnya di negara-negara Timur Tengah.

Pada tahun 2000-an industri halal mulai bergerak ke berbagai sektor gaya hidup (*lifestyle Industry*) termasuk di dalamnya sektor pariwisata, hospitaliti, rekreasi, perawatan medis, hingga mode (fashion), kosmetik, dan sebagainya. Hal itu dilatarbelakangi pertumbuhan populasi Muslim yang besar dan peningkatan kemampuan daya beli mereka yang semakin meningkat. Sejalan dengan *booming Global Halal Market* tersebut, Industri Pariwisata Dunia beberapa dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang fenomenal (Arief Yahya dalam Djakfar, 2017: iii).

Wisata dengan motivasi agama atau ruhani telah menyebar luas dan menjadi populer dalam beberapa dekade terakhir. Ia menempati segmen penting dari pariwisata internasional dan telah tumbuh secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang konsisten di segmen pasar ini telah menjadi tren global dalam industri pariwisata.

Pada hakikatnya, pariwisata dengan motif keagamaan ini bukanlah merupakan fenomena baru. Wisata religi telah lama menjadi motif integral, dan dianggap sebagai bentuk tertua dari sebuah aktivitas perjalanan. Setiap tahun jutaan orang melakukan

perjalanan ke tempat-tempat tujuan ziarah utama di seluruh dunia. Diperkirakan hampir 240 juta orang per tahun pergi untuk berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci atau peninggalan-peninggalan sejarah keagamaan, di antaranya Kristen, Islam dan Hindu (Jaelani, 2017: 1-2).

Agama memainkan peran penting dalam pengembangan wisata selama berabad-abad dan telah mempengaruhi bagaimana orang memanfaatkan waktu luang. Graburn (1983) dalam Jaelani (2017) mengamati bahwa pariwisata secara fungsional dan simbolis setara dengan lembaga lain yang digunakan manusia untuk memperindah dan menambahkan arti bagi kehidupan mereka. Hal ini dapat dipahami baik sebagai ritual sekuler biasa (liburan tahunan) yang berperan sebagai refleksi dalam kehidupan sehari-hari di sela-sela kesibukan bekerja, maupun sebagai bagian ritual yang lebih spesifik atau transisi pribadi yang dilakukan di persimpangan tertentu dalam kehidupan manusia.

Hubungan bervariasi antara pariwisata dan agama dapat dikonseptualisasikan sebagai kontinum berdasarkan tingkat intensitas motivasi keagamaan yang melekat. Pada satu sisi yang ekstrem terdapat bentuk ziarah yang bersifat suci, sebuah perjalanan yang didorong oleh iman, agama dan pemenuhan spiritual; sedangkan pada sisi lain terdapat wisatawan yang mungkin berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kebutuhan rohani melalui pariwisata. Smith (1992) dalam Jaelani (2017) menegaskan bahwa, dalam perjalanan ibadah haji, beberapa wisatawan mungkin berperan sebagai peziarah agama, sedangkan yang lain mungkin berperan sebagai wisatawan biasa.

Sejalan dengan perkembangan *global halal market* di atas, istilah-istilah yang digunakan dalam pariwisata berkonteks keislaman pun mengalami perkembangan. Setidaknya, terdapat tiga istilah yang digunakan, yaitu wisata religi, wisata syariah, dan wisata halal. Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*) menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi. Objek wisata religi berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain, oleh karena itu wisata religi seringkali erat kaitan dengan wisata sejarah, yang merupakan bagian dari wisata budaya.

Wisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar aturan hukum Islam. Objek wisata syariah mencakup seluruh objek wisata yang ada, kecuali yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Objek wisata syariah dapat berupa obyek-obyek konvensional seperti pantai, taman rekreasi, pagelaran seni budaya dan lain sebagainya yang masih dalam koridor hukum Islam. Sementara itu, istilah pariwisata halal merupakan sebuah konsep wisata yang tergolong baru. Beberapa referensi menyebut konsep wisata ini dengan istilah *Islamic tourism, syari'ah tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, Muslim-friendly travel destinations, halal lifestyle*, dan lain-lain.

Pariwisata halal merupakan konsep wisata yang mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Tourism Review, 2013). Ia dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah di saat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi

hasil ciptaan Allah SWT (*tadabbur ' alam*) dengan tetap menjalankan kewajiban shalat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya (Kamarudin, 2013).

Dilihat dari sisi industri, konsep pariwisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Konsep pariwisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata tentunya pariwisata halal memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai ke-Islaman yang disematkan di dalam kegiatan pariwisata.

2.2.1 Pengertian Pariwisata Halal

Karena pertumbuhan pasar perjalanan Muslim adalah fenomena baru, banyak terminologi dan definisi yang berbeda telah digunakan untuk merujuk segmen pasar ini oleh akademisi, media, dan organisasi lain. Beberapa definisi di bawah ini penulis kutip dari laporan penelitian COMCEC, sebuah komite kerjasama ekonomi dan komersial negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam laporan yang berjudul "*Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries*" (2016), istilah "Pariwisata Ramah Muslim" (MFT) dan "Pariwisata Halal" digunakan untuk merujuk pada definisi yang sama. Banyak akademisi mulai mendefinisikan MFT dengan terlebih dahulu

mengeksplorasi elemen-elemen yang membentuk pariwisata dan dampaknya. Di bawah ini adalah pengelompokan pada pemahaman MFT oleh berbagai profesional akademik.

Islamic Motivation

According to Duman (2011) Islamic tourism can be defined as “the activities of Muslims traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for participation of those activities that originate from Islamic motivations which are not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited”.

Faith-based needs and services

As a niche market “halal friendly” tourism includes; halal hotels, halal transport (halal airlines), halal food restaurants, halal tour packages and halal finance. Therefore, halal tourism consists of different sectors which are related with each other. (Akyol and Kilinc 2014).

Sureerat (2015) defines Halal tourism as offering tour packages and destinations that are particularly designed to cater for Muslim considerations and address Muslim needs.

Islamic teachings

Fatin Norain Osman (2015) defines Muslim tourism to be based on Islamic teaching that encourages individuals, especially women and children to travel with their muhrim which means that someone who has blood relation with them to provide them with security. (COMCEC Coordination Office, 2016: 24)

Sementara itu, COMCEC juga mengadopsi definisi-definisi yang digunakan oleh media-media terkemuka. Pengakuan MFT oleh media terkemuka, seperti referensi Wall Street Journal (2014) untuk pariwisata Muslim, didasarkan pada istilah “*Halal Travel*” atau “Perjalanan Halal”. Mereka cenderung menunjukkan bahwa jika makanan halal tersedia maka tempat tersebut merupakan tempat tujuan yang ramah Muslim. Pandangan publikasi ini dibentuk pada diskusi dengan organisasi terpilih

dalam industri perjalanan dan perhotelan. Selain itu, tidak ada keseragaman dari terminologi yang digunakan di seluruh publikasi.

Reuters (2014) dalam artikel mereka *“Thailand launches Muslim-friendly tourist app”*, mendefinisikan MFT sebagai menyediakan ruang sholat dan restoran halal di hotel dan pusat perbelanjaan. Sementara itu, The Guardian (2014) dalam artikelnya *“Indonesia’s Lombok promotes itself as ‘Muslimfriendly’ tourism destination”*, mendefinisikan pariwisata Muslim sebagai pariwisata “syariah”. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ramah Muslim adalah tempat dengan banyak masjid, dalam hal ini disebutkan bahwa Indonesia memiliki 600.000 masjid (COMCEC Coordination Office, 2016: 24-25)

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah disebutkan bahwa, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain, seperti asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

2.2.2 Pariwisata Berbasis Agama

Dewasa ini, agama atau landasan keimanan semakin mempengaruhi keputusan umat Islam dalam melakukan pembelian sejumlah produk halal. Hal ini terlihat dari pertumbuhan industri Islam yang cepat, seperti Perbankan Islam,

Makanan Halal, Busana Muslim, kosmetik halal, pariwisata halal dan industri terkait lainnya. COMCEC (2016: 19-20) mengaitkan peningkatan kepatuhan terhadap kebutuhan berbasis agama ini dengan tiga alasan utama:

Alasan # 1: “Jalan Hidup”

Umat Islam melihat Islam sebagai "jalan hidup", di mana pedoman dan nilai-nilainya menyentuh semua aspek kehidupan mereka, termasuk perilaku konsumsi. Pendorong gaya hidup Muslim yang unik ini berpusat pada makanan (*halal*), lingkungan yang ramah keluarga, praktik keagamaan, akomodasi, nuansa hubungan gender, pakaian sederhana, pendidikan, keuangan, dan area lainnya. Banyak dari nilai-nilai ini memang memiliki daya tarik universal, sehingga produk dan layanan tidak harus diposisikan secara eksklusif untuk umat Islam.

Alasan # 2: Menumbuhkan penghasilan dan lingkungan yang mendukung

Dewasa ini, pertumbuhan pasar berbasis agama ini juga disebabkan oleh fakta bahwa beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat saat ini adalah negara-negara mayoritas Muslim. Bangladesh, Indonesia, Arab Saudi, UEA, Malaysia, Nigeria, Turki, dan lainnya adalah beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat, menghasilkan pertumbuhan kelas menengah dan berpenghasilan tinggi. Tingkat pendapatan yang meningkat ini mendorong konsumen untuk menegaskan kebutuhan konsumsi mereka yang unik. Tren ini didukung oleh industri halal yang berkembang dan dipertahankan oleh pelaku ekonomi mayoritas Muslim terbesar di Malaysia, Arab Saudi dan Turki.

Alasan # 3: Sudah nyata dan berkembang

Pada dasarnya, iman sebagai atribut utama pasar sudah nyata dan berkembang bagi konsumen Muslim. Ada juga peningkatan perdagangan di antara negara-negara Muslim mengingat kedekatan kerjasama di antara mereka, sebagaimana terlihat semakin tumbuhnya kerjasama perdagangan di antara negara-negara anggota OKI. Dalam pariwisata, misalnya, banyak wisatawan Muslim bepergian ke negara-negara yang mayoritas Muslim (seperti Turki, Malaysia, dan Dubai) berdasarkan nilai afinitas, keamanan, dan kenyamanan (misalnya makanan halal, lingkungan ramah keluarga, fasilitas sholat, dll.)

2.2.3 Kebutuhan Wisatawan Muslim

COMCEC (2016) menyebutkan enam kebutuhan berbasis agama telah diidentifikasi sebagai area utama bagi para wisatawan Muslim. Mayoritas wisatawan Muslim mematuhi beberapa kebutuhan ini dengan tingkat kepentingan yang bervariasi.

1. Makanan Halal

Makanan halal adalah layanan yang paling penting yang dicari oleh seorang wisatawan Muslim ketika bepergian. Penerimaan dari berbagai tingkat jaminan makanan halal bervariasi di antara umat Islam. Akseptabilitasnya juga bervariasi tergantung pada daerah tempat wisatawan Muslim berasal. Adanya outlet makanan dengan jaminan Halal yang dapat diidentifikasi oleh para pengunjung adalah pilihan terbaik yang dicari oleh pengunjung Muslim dari Asia Tenggara dan Eropa Barat.

Sertifikasi halal umumnya diberikan oleh badan-badan lokal. Di beberapa negara anggota OKI, sertifikasi halal diatur oleh satu badan yang telah diizinkan untuk melakukan sertifikasi di negara tersebut. Di Indonesia, sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Dalam sertifikasi makanan halal, ada perbedaan kecil di antara standar yang diadopsi oleh lembaga sertifikasi. Di antara perbedaan utama adalah masalah krustasea. Masalah ini memiliki beberapa implikasi ketika diputuskan halal untuk pengunjung Muslim, karena dianggap tidak halal oleh beberapa madzhab hukum Islam. *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMICC) adalah badan standar untuk negara-negara anggota OKI, yang bertujuan untuk mencapai ‘*One Halal*’ logo dan ‘*One Halal*’ standard. SMICC memainkan peran penting dalam memungkinkan penggunaan sertifikasi halal secara luas.

2. Fasilitas Shalat

Shalat merupakan satu elemen utama dari praktik dan ibadah Islam dan itu adalah yang kedua dari lima rukun Islam. Untuk memenuhi kebutuhan ini, layanan dan fasilitas yang sering dikunjungi oleh wisatawan Muslim harus dilengkapi dengan ruang shalat yang ideal dengan ruang terpisah untuk pria dan wanita. Pertimbangan penting lainnya adalah ritual pembersihan yang disebut sebagai *Wudhu*. Wudhu dilakukan sebelum seorang Muslim melakukan shalat. Hal ini mengharuskan setiap ruang shalat dilengkapi dengan fasilitas wudhu.

3. Layanan Ramadhan

Meskipun sebagian besar umat Islam cenderung tidak melakukan perjalanan selama bulan Ramadhan, namun tidak menutup kemungkinan, ada sejumlah orang yang ingin menghabiskan waktu jauh dari rumah, terutama jika periode ini bertepatan dengan liburan sekolah. Selain itu, semakin banyak Muslim yang mengambil cuti selama dua hari raya besar Islam, yaitu Idul Fithri dan Idul Adha. Layanan utama yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama periode ini adalah kemampuan hotel-hotel di tempat wisata untuk melayani makanan halal sebelum fajar (*sahur*).

4. Kamar Mandi Ramah Air

Bagi umat Islam, air memainkan peran kunci dalam kemurnian dan kebersihan. Keduanya merupakan aspek inti dari ajaran agama/keimanan. Kebersihan fisik ditekankan sebagai komponen penting untuk menjadi seorang Muslim. Karena itu, perhatian khusus diberikan pada kebersihan di kamar mandi. Hal ini melibatkan penggunaan air di toilet, sehingga menjadi hal yang tidak nyaman bagi wisatawan Muslim ketika pengaturan untuk penggunaan air tidak tersedia.

5. Tidak Ada Kegiatan Non-Halal

Umat Islam mengkategorikan beberapa kegiatan sebagai perbuatan 'haram' atau tidak halal. Ketika datang untuk berwisata, mereka umumnya berpusat pada kebutuhan lingkungan yang ramah keluarga. Karena itu, beberapa wisatawan Muslim lebih suka menghindari fasilitas yang menyajikan alkohol, diskotik atau berdekatan dengan kasino/tempat-tempat perjudian.

6. Fasilitas dan layanan rekreasi dengan privasi

Sub-segmen wisatawan Muslim mencari fasilitas rekreasi yang memberikan privasi bagi pria dan wanita. Kebutuhan ini diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kolam renang dan pusat kebugaran yang terpisah atau menyediakan waktu berbeda untuk laki-laki dan perempuan;
- Pantai yang menyediakan area untuk dinikmati pria dan wanita secara terpisah, atau memperhatikan aspek privasi.

2.3 Pariwisata dalam Perspektif Islam

Sebagaimana terlihat dalam alasan-alasan di atas, label halal menjadi dasar keputusan bagi umat Islam untuk melakukan pembelian produk atau jasa layanan. Oleh karena itu, dalam uraian berikut ini dikemukakan makna konsep halal secara lebih komprehensif. Di samping itu, juga dikemukakan landasan-landasan ajaran Islam dalam al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad Saw terkait dengan hukum dan pandangan Islam tentang kepariwisataan.

2.3.1 Konsep Halal

Kata halal (bahasa Arab: *halla-yahillu-hillan*) mengandung arti membebaskan, membolehkan. Kata ini, dapat ditinjau dari dua pengertian: (1) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*. Al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat* (seperti

dikutip Dahlan, 2001), mengemukakan, bahwa pengertian pertama menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan *nas* (aturan-aturan hukum yang tersurat dalam sumber ajaran Islam).

Izutsu (1993: 389), mengatakan bahwa *haram* dan *halal* berasal dari lapisan bahasa yang sangat tua, keduanya dapat dikembalikan kepada gagasan Semitik lama tentang kebersihan ritual. *Haram* adalah suatu tabu, sedangkan *halal* secara sederhana menunjuk pada segala sesuatu yang tidak tergolong tabu, segala sesuatu yang "telah ditetapkan bebas" daripadanya. *Haram* dapat diterapkan pada tempat, pribadi, dan tindakan; dan segala sesuatu yang telah dirancang setepatnya terpisah dari dunia yang fana dan ditingkatkan kepada peringkat makhluk yang khas, yang "suci" (kudus). Dalam banyak hal, ia adalah sesuatu yang tak terdekati dan tak dapat disentuh.

Setelah Arab terislamkan, penggunaan al-Qur'an terhadap kata tersebut dikaitkan dengan pengenalan ketentuan Tuhan yang mutlak. Dengan kebebasan mutlak, Tuhan melarang (*hurrima*, mengharamkan) sesuatu dan menghentikan larangan (*uhilla*, menghalalkan) dari sesuatu itu (Izutsu, 1993: 390). Hal ini sebagaimana dikatakan Yusuf al-Qardawi, ahli fikih dari Mesir, bahwa yang berhak menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis. Manusia dalam hal ini tidak mempunyai

kewenangan sedikit pun. Sehingga ketika manusia melakukannya tindakan-tindakan itu, berarti ia telah membuat sekutu bagi Tuhan (Dahlan, 2001: 506).

Sementara itu, Izutsu (1993) mengatakan, bahwa makna *halal* secara semantik sedikit sekali yang dapat diungkapkan. Ia menunjuk segala sesuatu yang tidak "haram", segala sesuatu yang daripadanya larangan telah dicabut. Menurut Shihab (1996: 240), kata *halal* dari segi hukum Islam diartikan sebagai sesuatu yang bukan *haram*; sedangkan *haram* merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Oleh karenanya, Shihab mengaitkan pembahasan makna kata *halal* dengan lima kategori hukum yang terdapat dalam Islam, yaitu *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Empat yang pertama merupakan kelompok *halal*, yang boleh dilakukan (termasuk kategori *makruh*, dalam arti anjuran untuk ditinggalkan).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, ulama fikih Mazhab Hanbali, Allah Swt tidak semata-mata mengharamkan sesuatu kecuali di balik itu menghalalkan yang lainnya sebagai solusi akibat larangan tersebut. Juga ditegaskan Yusuf al-Qardawi, bahwa kombinasi antara yang *halal* dan yang *haram* dalam syariat Islam menunjukkan bahwa dalam Islam akan selalu ditemukan berbagai solusi dari segala kesempitan atau kesulitan yang dihadapi umatnya. Jika di satu pihak terdapat kesempitan karena secara hukum dikatakan *haram*, maka di sisi lain akan ditemukan jalan keluar dan keluasan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kepentingan manusia (Dahlan, 2001: 507).

2.3.2 Konsep Pariwisata dalam al-Quran dan Sunnah

Untuk memahami pandangan Islam tentang pariwisata, kajian terhadap sumber-sumber ajaran Islam (al-Quran dan Sunnah Rasulullah) tentang konsep tersebut menjadi hal pertama yang perlu dilakukan. Hal itu mengingat, bahwa sumber-sumber ajaran agama merupakan patokan atau acuan bagi umat Islam untuk melakukan segala tindakan atau aktivitasnya.

Pariwisata, yang secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, merupakan konsep yang tersusun atas dua suku kata: “pari” dan “wisata”. *Pari* memiliki arti: banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan lengkap. Sedangkan *wisata* berarti: perjalanan, bepergian (Fuad, 2014). Makna kebahasaan ini memiliki padanannya dalam bahasa Arab, seperti kata *sâra*, *siyâhah*, *rihlah*, atau *safar*.

Kata-kata *sâra*, *siyâhah*, *rihlah*, dan *safar* ditemukan di beberapa tempat dalam al-Quran maupun Sunnah. Namun kata-kata tersebut hanya menunjukkan pada makna secara umum dari aktivitas perjalanan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan tidak menunjukkan makna pariwisata sebagaimana yang dipahami dalam konteks ini. Johar Arifin (2015) dalam tulisannya *Wawasan al-Quran dan Sunnah tentang Pariwisata*, menyebutkan beberapa kata dimaksud yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah.

1. *Sâra*

Kata *sara* (berjalan, melakukan perjalanan) dan derivasinya (*sâra-yasîru-sairan-saiyarat*) diungkapkan sebanyak 27 kali dalam al-Quran, yaitu dalam surat al-Qashash: 29, al-Thur: 10, Yusuf: 10, 19, dan 109, al-Hajj: 46, al-Rum: 9 dan 42,

Fathir: 44, al-Mukmin: 21 dan 82, Muhammad: 10, Ali Imran: 137, al-An'am: 11, al-Nahl: 36, al-Naml: 69, al-Ankabut: 20, Saba` : 18, al-Kahfi: 47, Yunus: 22, al-Ra`d: 31, al-Naba` : 20, al-Takwir: 3, Thaha: 21, dan al-Maidah: 96 (Baqy, 1992 dalam Syahriza, 2014).

Dari sejumlah ayat al-Quran yang menggunakan kata *sara*, 14 ayat diantaranya menunjukkan anjuran Allah Swt bagi umat manusia untuk melakukan perjalanan, baik di sekitar tempat tinggalnya maupun ke luar daerah dan tempat-tempat yang jauh. Tujuh ayat di antaranya diungkapkan dalam bentuk perintah (*amr*) dan tujuh lainnya dalam bentuk *istifham inkariy*. Keseluruhan anjuran atau perintah melakukan perjalanan tersebut diiringi dengan perintah untuk memperhatikan (*nazhara*) Kemahakuasaan Allah Swt dan hal-hal yang menimpa manusia akibat kedurhakaan kepada-Nya.

Sebagaimana diungkapkan dalam ayat-ayat berikut ini:

Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (QS. Al-Ankabut [29]: 20)

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu" (QS. Al-An'am [6]: 11)

Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? (QS. Fathir [35]: 44)

2. *Safar*

Kata safar secara etimologi berarti keterbukaan. Kata ini kemudian dimaknai dengan perjalanan dengan jarak dan tujuan tertentu. Terdapat kaitan yang erat antara perjalanan dengan keterbukaan: (1) Dengan melakukan perjalanan, maka akan membuka cakrawala pandangan seseorang yang bepergian (*musafir*), sehingga ia mengetahui sesuatu yang sebelumnya tertutup; (2) Dalam konteks hukum Islam, *safar* mempunyai pengaruh terhadap ketentuan hukum suatu ibadah, yaitu dibolehkannya/terbukanya kesempatan mengambil keringanan (*rukhsah*) dari ketentuan asal yang dipandang memberatkan (*'azimah*) (Dahlan, 2001: 1529).

Kata safar dijumpai dalam al-Quran, antara lain dalam QS. Al-Baqarah [2]: 184, 185, dan 283; Al-Nisa [4]: 43; dan Al-Maidah [5]: 6. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) yang diberikan kemudahan dan keringanan dalam beribadah maupun bermu'amalah, seperti bertayamum untuk mengganti wudhu' atau mandi janabat dan berbuka bagi yang sedang berpuasa Ramadhan. Di antaranya firman Allah berikut ini:

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

3. *Rihlah*

Al-Quran menggunakan kata *rihlah* dalam arti perjalanan, sebagaimana yang dapat kita temukan dalam QS. Al-Quraisy [106]: 1-4 (Al-Asfihani, 1989 dan Baqy, 1984 dalam Arifin, 2015: 149). Surat tersebut menerangkan kebiasaan suku Qiraisy dalam melakukan perjalanan pada musim dingin ke kota Yaman dan pada musim panas ke kota Syam untuk keperluan perdagangan dan keperluan lainnya.

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (QS. Al-Quraisy [106]: 1-4)

Kata *rihlah* dengan makna perjalanan juga ditemukan dalam beberapa hadis Rasulullah Saw. Misalnya hadis yang mengemukakan tentang anjuran Rasulullah Saw untuk menziarahi masjid: *Tidaklah ditekankan untuk berziarah (al-rihâl) kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Masjid al-Haram, Masjid Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan Masjid al-Aqsha (HR. Mutafaq 'alaih)*

4. *Siyahah*

Kata *Siyahah* (*saha-yasihu-siyahah*) terdapat dalam al-Quran surat al-Taubat [9]: 2 dan 112. Dalam ayat 2 surat al-Taubah Allah berfirman:

Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir (QS. Al-Taubah [9]: 2)

Ayat di atas dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah memberikan kesempatan kepada kaum musyrikin untuk melakukan perjalanan di muka bumi dengan aman selama empat bulan sebagai ketentuan dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan. Mereka diberi waktu dalam 20 hari bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, dan 10 hari Rabi'ul Akhir.

Dalam surat al-Taubah ayat 112, kata *siyahah* diungkapkan dalam bentuk *fa'il* (subyek/pelaku perjalanan). Mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan (*al-sayihun*) demi menegakkan agama Allah, yang merupakan salah satu tanda-tanda orang beriman yang dijanjikan surga oleh Allah dalam ayat sebelumnya.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (QS. Al-Taubah [9]: 112)

Pada ayat di atas, orang-orang yang melakukan perjalanan (*al-sâihun*), disandingkan dengan orang-orang yang bertaubat, ahli ibadah, yang ruku' dan sujud, berbuat yang ma'ruf dan menghindari yang munkar, dan memelihara ketentuan-ketentuan agama. Hal tersebut dapat dipahami, karena perjalanan yang dilakukan seorang mukmin tidak lain adalah demi menegakkan agama Allah. Sebagaimana dikuatkan maknanya dalam sebuah hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

Seorang laki-laki berkata: "*Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perjalanan.*" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "*Sesungguhnya perjalanan umatku adalah berjihad di jalan Allah ta'ala.*" (HR. Sunan Abu Dawud Nomor 2127)

2.3.3 Dorongan Agama untuk Melakukan Perjalanan

Dengan memperhatikan sisi kebahasaan al-Quran dan Sunnah yang menjadi padanan istilah pariwisata di atas, kita dapat memahami bahwa agama Islam tidak saja membolehkan, bahkan juga memerintahkan umatnya untuk melakukan perjalanan dengan tujuan-tujuan tertentu. Seruan Islam untuk melakukan perjalanan mencakup aspek yang lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam istilah kepariwisataan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Merenungi Kemahakuasaan Allah

Sebagaimana terungkap dalam ayat-ayat pada bagian di atas, perintah Allah Swt untuk melakukan perjalanan di muka bumi adalah untuk mengenal Tuhan. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam dan fenomenanya sebagai ciptaan Allah, akan mengantarkan manusia kepada kesadaran akan Keesaan dan Kemahakuasaan-Nya (Shihab, 1996), dan sekaligus mengingatkan manusia betapa lemah dirinya di hadapan-Nya.

Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut [29]: 20)

2. Memupuk Sikap Keberagamaan

Melakukan perjalanan untuk mengunjungi ka'bah (*Bait Allah*) dalam ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan yang sangat didambakan setiap Muslim yang beriman. Haji dan umrah adalah perjalanan yang sangat dikenal dalam Islam. Ia

dipandang sebagai wujud kesempurnaan bangunan keislaman sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Perjalanan itu diwajibkan oleh Allah Swt. bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat berikut:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali Imran [3]: 97)

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh (QS. Al-Hajj [22]: 27)

Di samping kewajiban mengunjungi tempat-tempat suci di Makkah dan sekitarnya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, Islam juga menganjurkan umatnya untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya. Misalnya menziarahi Masjid al-Haram, Masjid Rasulullah di Madinah dan Masjid al-Aqsha sebagaimana anjuran Rasulullah dalam hadis di atas. Perjalanan/ziarah yang demikian dimaksudkan untuk mengembangkan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan bagi umat Islam (Karim, 2013). Dengan cara ini, manusia akan terdorong untuk meneladani kehidupan Rasulullah dan umat sebelumnya, serta selalu berusaha untuk mencapai tingkat manusia yang sempurna (Sayyid Quthub dalam Arifin, 2015)

3. Membuka Wawasan untuk Pengembangan Ilmu pengetahuan

Alam raya ciptaan Allah adalah obyek ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab, kata '*ilmu*' seakar dengan kata '*alam*' (jagat raya, univers), dan '*alamah*' (tanda-tanda). Alam raya adalah tanda-tanda keberadaan Tuhan yang harus diketahui (*ma'lum*) oleh

manusia. Melalui perenungan terhadap alam raya ini, maka manusia dapat mengembangkan berbagai pengetahuan (Madjid, 1998: 1-2). Dengan demikian, perintah melakukan perjalanan di muka bumi tidak saja akan mengantarkan manusia pada keimanan kepada Allah, tetapi juga akan mendorongnya untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya (Shihab, 1996).

Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Al-Ra'd [13]: 3)

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah (QS. Ali Imran [3]: 137).

Melakukan perjalanan dalam rangka mencari dan mengembangkan Ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam kemudian dikenal istilah *rihlah ilmiah*. Pada permulaan Islam, Al-Khatib Al-Bagdady menulis sebuah kitab yang terkenal, *Al-Rihlah fi Thalab al-Hadits*, yang menggambarkan perjalanan yang dilakukan para ulama hadis untuk mencari hadis-hadis dari sumbernya, meneliti keadaan perawi dan sebagainya dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan ke berbagai mancanegara sebagaimana yang dilakukan Imam-imam Hadis (Syahriza, 2014; Arifin, 2015).

4. Mengembangkan Bisnis dan Perniagaan

Tujuan lain pariwisata/bepergian yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis dalam rangka mengembangkan harta kekayaan. Islam sangat

memandang positif terhadap harta kekayaan. Ia dinilai oleh Allah Swt. sebagai "*qiyaman*", yaitu sarana pokok kehidupan (QS Al-Nisa' [4]: 5). Oleh karena itu, Kitab Suci itu mengistilahkannya dengan "*fadhil Allah*", yang secara harfiah berarti "kelebihan yang bersumber dari Allah". Dalam al-Quran surat Al-Jumu'ah [62]: 10 Allah Swt berfirman: "*Apabila kamu telah selesai shalat (Jumat), maka bertebaranlah di bumi, dan carilah fadhil (kelebihan/rezeki) Allah.*" Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan bantuan kepada pihak lain yang tidak berkecukupan (Shihab, 1996).

Melakukan perjalanan untuk berdagang dari satu tempat ke tempat lain merupakan tradisi yang sudah berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam. Sebagaimana hal tersebut diungkap dalam al-Quran surat al-Quraisy [106]: 1-4. Perjalanan dagang dari Syam ke Yaman dan sebaliknya juga dilakukan Muhammad Saw ketika beliau memperdagangkan barang-barang Khadijah, sebelum beliau akhirnya memperistri wanita tersebut sebelum masa pewahyuan (Haekal, 1996: 63).

5. Menyebarkan Islam ke Berbagai Belahan Dunia

Kebiasaan melakukan perjalanan yang menjadi tradisi orang-orang Arab sejak masa pra-Islam, pada akhirnya, ketika Islam hadir di tengah-tengah mereka, agama itu segera menyebar ke berbagai wilayah yang mereka kunjungi. Di samping adanya para sahabat yang sengaja diutus oleh Rasulullah dan Khalifah Rasyidin untuk berdakwah, perjalanan dagang juga menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan

pesan Islam ke berbagai wilayah dunia. Sejarah mencatat, bahwa melalui perjalanan dagang juga Islam disebarkan ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara.

Dengan nilai-nilai sebagaimana uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa wisata dalam Islam (*Islamic tourism*) berbeda dengan wisata yang dipahami secara sekuler (*Secular tourism*). Perbedaan kedua konsep wisata itu terletak pada tujuannya. Berwisata dalam Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dapat menambah kesadaran keberagaman, bukan untuk kesenangan semata-mata.

2.4 Potensi Pariwisata Halal di Indonesia

Pariwisata merupakan komponen perekonomian penting bagi Indonesia serta sumber pendapatan devisa yang signifikan. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, pada 87,2% pada 2010. Negara ini adalah tujuan wisata yang populer; dari keindahan alam, warisan sejarah hingga keanekaragaman budaya sebagai daya tarik utama. Sektor pariwisata menempati peringkat terbesar ke-4 dalam sektor industri di Indonesia. Wisatawan asal Singapura, Malaysia, Cina, Australia, dan Jepang adalah lima sumber pengunjung teratas ke Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-6 di seluruh dunia dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) pada tahun 2015 (COMCEC, 2016).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki 88% populasi Muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta *mega biodiversity* dan lebih dari 800.000 masjid, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal. Hal tersebut tidaklah

berlebihan, karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (*halal lifestyle*). Dengan didukung tingkat pertumbuhan Pasar Pariwisata Halal yang pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan Muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% (*rate of growth forecast*) sejak tahun 2014, maka Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan *Wonderful Indonesia* sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia (Arief Yahya dalam Djakfar, 2017: v-vi).

Gambar 2.1

Potensi dan Peluang Wisata Halal Global



Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata telah berkomitmen mengembangkan Pariwisata Halal di Indonesia berkolaborasi dengan Pentahelix (ABCGM) Stakeholder meliputi Akademisi, Bisnis (Pelaku Usaha), *Community* (Komunitas), *Government* (Pemerintah), dan Media.

Kemenparekraf (2013) menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi di Indonesia untuk menjadi wilayah tujuan wisata halal, di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Dalam melihat kesiapan destinasi wisata di wilayah-wilayah tersebut di atas, beberapa aspek utama pariwisata digunakan sebagai indikator penilaian, di antaranya adalah (dikutip dari *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015):

1. **Produk.** Pengembangan produk yang berdasarkan kriteria umum dan standardisasi yang diterapkan untuk usaha pariwisata syariah dan daya tarik.
2. **SDM dan Kelembagaan.** Kompetensi profesi insan pariwisata syariah yang ditunjang oleh training dan pendidikan yang sesuai dengan sasaran Standar Kompetensi yang dibutuhkan wisatawan muslim.
3. **Promosi.** Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku wisatawan muslim, *World Islamic Tourism Mart (WITM)*, *Arabian Travel Mart*, *Emirates Holiday World*, *Cresentrating.com*, *halaltrip.com*, dll.

Gambar 2.2

Destinasi Wisata Syariah di Indonesia



Sumber: Kemenparekraf, 2013, *Indonesia as Moslem Friendly Destination*

Berdasarkan konsep baru pariwisata ini, pemerintah mempersiapkan beberapa komponen yang diperlukan dalam wisata syariah, yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan *anciliary*. Berdasarkan kajian pengembangan wisata syariah Kementerian Pariwisata (2015), komponen-komponen wisata halal tersebut mulai dikembangkan, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Komponen Kesiapan Destinasi Wisata Syariah

No.	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
1.	Atraksi	1. Alam 2. Budaya 3. Buatan	Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria pariwisata syariah.	Ordinal
			Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.	Ordinal

			Terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim di objek wisata.	Ordinal
			Terdapat sarana bersuci yang layak (kebersihan dan ketersediaan air untuk bersuci) di objek wisata.	Ordinal
			Tersedia makanan dan minuman halal.	Ordinal
2.	Amenitas	1. Perhotelan	Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.	Ordinal
			Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.	Ordinal
			Tersedia makanan dan minuman yang halal.	Ordinal
			Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.	Ordinal
		2. Restoran/penyedia makanan dan minuman	Terjamin kehalalan makanan dan minuman dengan sertifikat halal MUI.	Ordinal
			Ada jaminan halal dari MUI setempat, tokoh muslim atau pihak terpercaya dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya.	Ordinal
			Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.	Ordinal
		3. Biro perjalanan wisata	Menyediakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata syariah.	Ordinal
			Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.	Ordinal
			Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.	Ordinal
		4. Spa	Terapis pria untuk pelanggan pria, dan terapis wanita untuk pelanggan wanita.	Ordinal
			Tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi.	Ordinal
			Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya.	Ordinal
			Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.	Ordinal
		5. Pramuwisata	Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam melaksanakan tugas.	Ordinal
			Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.	Ordinal

			Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai etika Islam.	Ordinal
			Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku.	Ordinal
3	Aksesibilitas	1. Informasi	Kemudahan akses informasi wisata syariah/halal.	Ordinal
			Transportasi (darat, laut, udara) mudah.	Ordinal
		2. Keterjangkauan	Objek wisata mudah dijangkau.	Ordinal
4	Ancillary	1. Kelembagaan	Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata.	Ordinal
			Terdapat kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata.	Ordinal
		2. Pemberdayaan masyarakat	Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal.	Ordinal
			Sikap masyarakat	Ordinal
		3. Pemasaran	Promosi	Ordinal
			Branding yang tepat	Ordinal

(Sumber: *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015)

Dalam rangka mendukung pengembangan Pariwisata Syari'ah, pada tahun 2016 Dewan Nasional Syari'ah – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan sejumlah ketentuan yang dimuat dalam Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan pariwisata syari'ah, DSN-MUI memberikan landasan umum, yaitu bahwa penyelenggara wisata diwajibkan: 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, dan kemungkar; 2) Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Untuk hotel syariah, DSN-MUI dalam fatwanya memberikan aturan-aturan sebagai berikut: 1) Tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; 2) Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila; 3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI; 3) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 4) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; 5) Wajib memiliki pedomaan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; 6) Wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Destinasi-destinasi wisata syari'ah wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: 1) Mewujudkan kemashlahatan umum; 2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan; 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan; 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Di samping itu, destinasi wisata juga diwajibkan memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah; serta makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI. Destinasi wisata wajib terhindar dari; 1) Kemusyikan dan khurafat; 2) Maksiat,

zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan perjudian; 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk SPA, Sauna, dan Massage, fatwa DSN-MUI memberikan ketentuan sebagai berikut: 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI; 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi; 3) Terjaganya kehormatan wisatawan; 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan SPA, sauna, dan Massage kepada wisatawan laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh melakukan itu semua kepada wisatawan wanita; 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Biro Perjalanan wisata syariah wajib memenuhi ketentuan berikut ini: 1) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 2) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 3) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI; 4) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan jasa pelayanan wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; 5) Mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah; 6) Memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Sedangkan untuk Pemandu wisata syariah wajib memiliki ketentuan berikut ini: 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih parawisata; 2) Berakhlak mulia,

komunikatif, ramah jujur, dan bertanggung jawab; 3) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat; 4) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Prestasi Indonesia

Dalam kompetisi World Halal Tourism Awards 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 24 Oktober - 25 November 2016, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan (Jaelani, 2017). Adapun penghargaan dalam World Halal Tourism Awards 2016 dengan 12 kategori yang diraih Indonesia adalah:

1. *World's Best Airline for Halal Travelers*: Garuda Indonesia.
2. *World's Best Airport for Halal Travelers*: Sultan Iskandar Muda International Airport, Aceh Indonesia.
3. *World's Best Family Friendly Hotel*: The Rhadana Hotel, Kuta, Bali, Indonesia.
4. *World's Most Luxurious Family Friendly Hotel*: Trans Luxury Hotel Bandung Indonesia.
5. *World's Best Halal Beach Resort*: Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok, NTB.
6. *World's Best Halal Tour Operator*: Ero Tour, West Sumatera Indonesia
7. *World's Best Halal Tourism Website*: www.wonderfullombok-sembawa.com, Indonesia.

8. *World's Best Halal Honeymoon Destination*: Sembalun Village Region, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
9. *World's Best Hajj & Umrah Operator*: ESQ Tours & Travel, Jakarta, Indonesia.
10. *World's Best Halal Destination*: West Sumatera, Indonesia.
11. *World's Best Halal Culinary Destination*: West Sumatera, Indonesia
12. *World's Best Halal Cultural Destination*: Aceh, Indonesia.

Selain meraih penghargaan-penghargaan tersebut, pada tahun 2019 Indonesia berhasil meraih peringkat teratas versi *Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2019*. Prestasi ini diraih setelah lima tahun sejak pertama kalinya Indonesia bergabung di *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara lain seperti Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, dalam sambutannya menyatakan, menempati posisi pertama GMTI memang sudah ditargetkan Indonesia melalui berbagai cara yang diupayakan. Terdapat empat kriteria GMTI dalam menganalisa kesehatan dan pertumbuhan berbagai destinasi wisata ramah muslim diantaranya: akses komunikasi, lingkungan dan layanan. Akses Indonesia tumbuh besar, dari segi komunikasi. Lalu Indonesia juga memiliki berbagai atraksi (dikutip dari CNN Indonesia dalam www.ekonomisyariah.org).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah mengkaji masalah wisata halal, di antaranya: Aan Jaelani (2017), *Industri Wisata Halal di Indonesia: potensi dan prospek*. Penelitian ini memaparkan industri wisata halal di Indonesia ditinjau dari segi ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Dalam penelitian ini juga disebutkan, bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia diperlukan strategi pengembangan yang diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata seperti pembenahan infrastruktur, promosi, dan penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.

Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, Kementerian Pariwisata (2015), *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Laporan ini berisikan kajian wisata syariah di Indonesia khususnya di Aceh dan Manado dalam hal kesiapan tiap-tiap destinasi dan strategi pengembangan wisata syariah yang sesuai dengan karakteristik destinasi wisata di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, Aceh dianggap sudah cukup optimal dalam mencanangkan wisata syariah dalam produk wisatanya namun masih memerlukan beberapa perbaikan atau strategi dalam menggaet wisman Malaysia sebagai market utamanya. Sementara Manado ditemukan belum optimal atau belum siap dalam pengembangan wisata syariah dan masih cukup banyak yang harus disiapkan jika akan mengembangkan wisata syariah.

Ujang Suyatman, dkk. (2018), *Pariwisata Halal Pulau Lombok, Aktualisasi Nilai Budaya Islami dalam Industri Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*. Penelitian ini mengkaji pengembangan wisata di Pulau Lombok, NTB sebagai salah satu wilayah yang membangun industri pariwisatanya dengan konsep halal. Pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok didukung dengan sejumlah potensi, seperti keindahan alam dan budaya masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Melalui pengembangan pariwisata halal dengan sebutan Pulau Seribu Masjidnya, Pulau Lombok meraih berbagai penghargaan pariwisata halal global, di antaranya: *World's Best Halal Beach Resort* untuk Novotel Lombok Resort & Villas, dan *World's Best Halal Honeymoon Destination* untuk Sembalun Village Region, dalam *World Halal Tourism Awards 2016*.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penulisan penelitian ini, dua yang pertama lebih terfokus pada potensi-potensi pariwisata halal ditinjau dari segi ekonomi dan kesiapan destinasi wisata halal di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2018 menitik beratkan pada pemaparan mengenai pengembangan pariwisata halal di wilayah yang mayoritas Muslim dengan budaya masyarakatnya yang secara DNA sudah lekat dengan perilaku halal.

Penelitian ini dibedakan dengan penelitian-penelitian di atas. Dalam kesempatan ini, penelitian difokuskan pada pengembangan wisata halal di Pulau Bali, sebagai wilayah yang secara budaya banyak diwarnai dengan nilai-nilai luhur agama Hindu. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa pariwisata halal adalah konsep

pariwisata yang tidak dibatasi pada wilayah geografis Muslim, atau destinasi-destinasi yang bernuansa keagamaan. Pariwisata halal adalah salah satu segmen bisnis pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan, baik Muslim maupun non-Muslim. Untuk itu, tren pariwisata halal global juga mempengaruhi perkembangan kepariwisataan di Pulau Bali, sebagai destinasi wisata utama Indonesia dan tujuan kunjungan wisatawan mancanegara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya aktivitas pariwisata yang dilakukan oleh subyek penelitian. Penelitian mengenai *Muslim Friendly Tourism* (MFT) ini dilakukan di Provinsi Bali. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini antara lain adalah:

- a. Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Sebagai tujuan utama wisata di Indonesia, Bali sudah sangat dikenal wisatawan mancanegara, terutama karena pesona keindahan alamnya yang sangat memukau dan nuansa budayanya yang kental dengan nilai-nilai filosofis agama Hindu, yang menarik perhatian dunia.
- b. Sejak tahun 2013, Provinsi Bali menjadi salah satu daerah tujuan wisata syari'ah yang direkomendasikan Pemerintah Republik Indonesia dalam *Global Halal Forum* yang diselenggarakan pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
- c. Di samping itu, dalam kompetisi *World Halal Tourism Awards* 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 24 Oktober - 25 November 2016, dari 12 kategori penghargaan yang diraih Indonesia, The Rhadana Hotel, Kuta, Bali menjadi salah satu pemenang untuk kategori *World's Best Family Friendly Hotel*.

3.1.2 Subyek Penelitian

Pelaku yang menjadi subyek dalam penelitian ini meliputi sumber daya manusia dalam sektor kepariwisataan. Ia meliputi unsur-unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha kepariwisataan, tokoh masyarakat, serta wisatawan dan stakeholders terkait lainnya. Mengingat banyak dan luasnya unsur-unsur tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan teknik penentuan sampel subyek dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Penggunaan teknik ini terkait dengan kompetensi subyek dalam pengungkapan data/informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

Adapun aktivitas subjek yang diteliti adalah aktivitas kepariwisataan, khususnya pariwisata halal yang melibatkan seluruh unsur-unsur di atas. Aktivitas itu meliputi perumusan regulasi, implementasi wisata halal di setiap destinasi, serta penilaian dari para stakeholder terkait pengembangan pariwisata halal Pulau Bali.

3.2 Metode dan Pendekatan Penelitian

3.2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode ini karena dipandang lebih tepat untuk digunakan dalam memahami cara-cara atau pola-pola hidup masyarakat daripada metode penelitian kuantitatif. Dengan melakukan penyelidikan kualitatif, peneliti mendekati partisipan yang diteliti dan mengembangkan pemahaman tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka (Suyatman, 2018).

Metode penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Denzin (1978) dalam Sinthuvana (2009: 62), menyebut penelitian jenis ini sebagai “penelitian yang komitmen untuk aktif memasuki dunia tempat individu berinteraksi.” Ia juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Satori dan Komariah, 2010; Sugiyono, 2008).

Obyek alamiah sebagaimana dimaksudkan di atas adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Makna sentral masalah dalam penelitian kualitatif lebih bersifat eksplorasi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, atau – sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu pengembangan pariwisata halal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk ditemukan makna dibaliknyanya. Sebagaimana dikatakan Sarwono (2003), pendekatan kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Dalam hal ini, urutan kegiatan penelitian berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utamanya adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi sebuah teori.

Atas dasar itu, penulis memilih metode penelitian kualitatif dalam memahami pengembangan pariwisata halal di Pulau Bali sebagai obyek penelitian. Obyek penelitian dieksplorasi dan dipahami sebagai realitas alamiah. Tidak diintervensi atau dicampurtangani oleh kehadiran peneliti. Aktivitas yang

peneliti lakukan hanyalah semata-mata membuat pengamatan langsung mengenai fenomena yang diteliti dan berbicara langsung dengan para partisipan. Dalam melakukan aktivitas tersebut, peneliti tidak berupaya mengontrol atau memanipulasi partisipan, atau menunjukkan mana variabel atau fenomena penting dari realitas yang terjadi. Satu-satunya hal yang peneliti lakukan adalah mengamati, melakukan wawancara, merekam informasi yang didapatkan, kemudian menafsirkan dan membuat kesimpulan mengenai informasi tersebut.

3.2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak tegas, dan memanfaatkan beragam sumber bukti (Yin, 2008: 9). Stake (1995) dalam Sinthuvana (2009) menyebutnya sebagai "sistem terbatas", yang dalam hal ini peneliti memperhatikan kasus ini sebagai sebuah objek yang mewakili fenomena yang menarik. Fungsi sebenarnya dari pendekatan ini adalah untuk menyoroti kekhasan dan keunikan. Sedangkan tujuan utama menggunakan pendekatan studi kasus adalah untuk memahami detail dan pengalaman yang terkait dengan pengembangan pariwisata halal yang dilakukan para pihak terkait di Provinsi Bali.

Penekanan pada pilihan pendekatan studi kasus, terkait dengan peristiwa kontemporer yang menjadi obyek penelitian. Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer yang tidak dapat dimanipulasi. Keunikannya dibanding dengan pendekatan lainnya adalah kemampuannya untuk

berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti, yaitu dokumen, wawancara, dan observasi (Yin, 2008: 12), yang merupakan teknik-teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Alasan lain penggunaan pendekatan studi kasus adalah bahwa secara analitik, serangkaian hasil penelitian studi kasus dapat dibuat generalisasi terhadap teori yang lebih luas.

3.3 Instrumen Penelitian

Konsep dasar penelitian menyatakan, bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan tindakan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Untuk itu harus ada alat ukur yang baik dan sesuai untuk mengukur variabel-variabel yang ada dalam fenomena-fenomena yang tersebut. Dalam kegiatan penelitian, alat ukur itu biasanya dinamakan instrumen penelitian.

Instrumen penelitian merupakan tumpahan teori dan pengetahuan yang dimiliki peneliti mengenai fenomena yang diharapkan mampu mengungkapkan informasi-informasi penting dari fenomena yang diteliti. Sedangkan efektivitas proses penggunaan instrumen itu akan sangat tergantung pada proses pengumpulan data yang nota bene menggunakan instrumen yang dibuat peneliti (Sugiyono, 2008: 250). Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah orang (*human instrument*), yaitu peneliti sendiri. Dengan kata lain, alat penelitian adalah peneliti sendiri. Kategori instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki pemahaman yang baik tentang metodologi penelitian, penguasaan wawasan bidang yang diteliti, dan kesiapan untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya (Satori,

2007: 10). Hal ini dilakukan agar peneliti mampu menetapkan fokus penelitian, memilih partisipan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan penelitian.

Oleh karena itu, sebagai *key instrument* (Sugiyono, 2008: 251) dalam proses penelitian, peneliti berupaya seoptimal mungkin membekali diri dengan teori dan wawasan mengenai kepariwisataan, khususnya pariwisata halal. Dengan bekal tersebut, peneliti menjadi mampu bertanya, menganalisis, memotret serta mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti untuk memperoleh kejelasan dan kebermaknaannya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Salim (2001) mengatakan, bahwa penelitian kualitatif secara inheren merupakan multi-metode di dalam satu fokus, yaitu yang dikendalikan oleh masalah yang diteliti. Penggunaan multi-metode atau yang lebih dikenal dengan triangulasi (*triangulations*) mencerminkan suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Triangulasi bukanlah alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanyalah suatu alternatif terhadap pembuktian. Kombinasi yang dilakukan dengan multi-metode, bahan-bahan empiris, sudut pandang dan pengamatan yang teratur menjadi strategi yang lebih baik untuk menambah kekuatan, keluasan dan kedalaman suatu penelitian.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2008: 330), triangulasi sumber berarti

penggunaan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda. Sedangkan triangulasi teknik, yaitu penggunaan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

3.4.1 Wawancara

Nasution (1996: 69) mengemukakan pentingnya metode wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui persepsi partisipan tentang dunia kenyataan. Kegiatan tersebut diperlukan, karena melalui observasi saja tidak cukup memadai dalam melakukan penelitian. Mengamati kegiatan dan kelakuan orang saja tidak dapat mengungkapkan apa yang diamati atau dirasakan orang lain, tanpa dilengkapi dengan wawancara. Dengan melakukan wawancara kita dapat memasuki dunia pikiran dan perasaan responden.

Wawancara digunakan untuk menggali gagasan, prakarsa dan landasan filosofis yang melatar-belakangi pengembangan industri pariwisata di Pulau Bali. Di samping itu, juga untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta respon dari berbagai pihak terkait dengan program pengembangan kepariwisataan di Pulau Bali.

Penggunaan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal tertentu dari partisipan tertentu secara lebih mendalam. Seperti dikatakan Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008: 194), metode ini digunakan karena peneliti beranggapan bahwa: a) subyek/partisipan adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, b) apa yang dikatakan partisipan kepada peneliti

adalah benar dan dapat dipercaya, dan c) interpretasi partisipan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sama dengan yang dikehendaki peneliti.

Namun demikian, tidak jarang peneliti harus menjelaskan tentang maksud pertanyaan atau informasi yang dikehendaki secara lebih rinci karena sumber yang diwawancara kurang tepat menginterpretasi pertanyaan yang diajukan. Di samping itu, istilah-istilah halal seringkali dimaknai berbeda antara konsep-konsep yang dibahas secara akademis dalam kajian hukum Islam dengan pemahaman dan penerapan konsep tersebut dalam dunia nyata, terlebih dunia kepariwisataan. Kendala lain yang dihadapi, tidak selamanya wawancara dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan. Partisipan, karena satu dan lain hal, menjadikan jadwal wawancara yang sudah dibuat sesuai kesepakatan awal, harus diubah.

Peneliti menggunakan jenis wawancara percakapan informal dan pendekatan panduan wawancara selama melakukan wawancara dengan para partisipan. Jenis wawancara ini dinamakan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) (Patton, 2002, dalam Sinthuvana, 2009: 67). Pertanyaan indikatif digunakan peneliti sebagai panduan wawancara. Semua wawancara dilakukan dengan tatap muka antara peneliti dan para partisipan di lingkungan institusi tempat mereka beraktivitas. Melalui pendekatan ini, peneliti lebih leluasa untuk melakukan wawancara, sementara rangkaian pertanyaan yang belum ditentukan sebelumnya dipandu berdasarkan pedoman wawancara yang disusun

mencakup garis-garis besar yang digunakan untuk penyelidikan terhadap setiap orang yang diwawancarai.

Responden yang peneliti wawancarai terkait pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali, pengusaha hotel, tokoh masyarakat, akademisi, serta beberapa orang wisatawan yang sedang berkunjung ke berbagai destinasi wisata Pulau Bali.

3.4.2 Observasi

Observasi adalah cara yang memungkinkan peneliti berhubungan secara langsung dengan obyek penelitian. Dengan hubungan langsung tersebut peneliti dapat melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Patton seperti yang dikutip Nasution (1996: 59) mengemukakan beberapa manfaat yang diperoleh melalui teknik observasi dalam mengumpulkan data. Dengan berada di lapangan, peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti menggunakan teknik induktif, sehingga tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep atau pandangan sebelumnya. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada di lingkungan itu, karena telah dianggap biasa, dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara. Peneliti juga dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dipandang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan hal-hal di luar persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif. Melalui observasi lapangan ini, peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan akan tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi.

Sebagaimana digambarkan Mc. Millan dan Schumacher (2001:578), bahwa pengamatan memungkinkan peneliti memperoleh persepsi manusia mengenai peristiwa dan prosesnya. Persepsi itu digambarkan dengan tindakan sebagai ekspresi perasaan, pemikiran, dan kepercayaan. Persepsi-persepsi itu terungkap dalam tiga bentuk: pengetahuan verbal, non-verbal, dan yang tersembunyi. Pengetahuan tentang pola linguistik dan variasi bahasa tertentu dari individu yang diamati sangat dibutuhkan oleh peneliti guna melakukan perekaman dan interaksi dengan mereka. Pola-pola tersebut dapat mengemukakan bahasa yang sebenarnya, yang biasanya sulit atau tidak mungkin diartikulasikan oleh individu yang bersangkutan.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tanpa melalui keterlibatan langsung peneliti (observasi non-partisipatif) dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang sedang diamati di lapangan. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti tidak terlibat langsung secara emosional dengan pelaku yang menjadi sasaran penelitian (Suparlan, dalam Satori dan Komariah (2010:119). Dengan cara itu, informasi yang didapatkan tidak bias, sekalipun tidak terlalu mendalam sampai kepada tingkat makna sebagaimana jika dilakukan dalam keterlibatan peneliti secara langsung.

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati tanda-tanda yang mencerminkan usaha pengembangan pariwisata halal di Provinsi Bali, seperti tulisan atau logo halal di restoran-restoran dan hotel-hotel, ketersediaan tempat shalat dan tempat bersuci di berbagai destinasi, cara-cara pramu wisata berinteraksi dengan wisatawan, serta komponen-komponen wisata lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan, menganalisis dan mengambil kesimpulan terhadap tanda-tanda yang ada pada obyek yang diamati.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Wawancara dan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling dominan dalam penelitian kualitatif. Hal itu karena data dalam penelitian naturalistik memang kebanyakan diperoleh dari sumber manusia (human resources) (Nasution, 1996: 85). Namun demikian, salah satu sumber informasi penting yang juga digunakan oleh peneliti adalah dokumen. Terdapat beberapa alasan digunakannya dokumen dalam penelitian ini, antara lain; 1) merupakan sumber yang stabil, kaya dan, menarik untuk diteliti; 2) berguna sebagai “bukti” untuk sebuah pengujian; 3) sifatnya sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu alamiah, sesuai dengan konteks, nyata, dan berada dalam konteks; 4) mudah diperoleh (dengan melakukan pencarian) dan relatif murah, dan 5) dapat membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Lincoln dan Guba, 1981, dalam Moleong, 1994: 161)

Penggunaan bahan dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk komparasi data, sehingga dapat dihasilkan generalisasi-generalisasi (Kartodirdjo, S., 1991: 47). Hal itu dilakukan guna mendukung kredibilitas atau kepercayaan

data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi (Satori dan Komariah, 2010: 149). Sebagaimana dikatakan Wolff (2004) dalam Sinthuvana (2009:73), analisis dokumen diakui sebagai metode penelitian yang independen, yaitu bahwa peneliti dapat menggunakannya untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Adapun bahan-bahan dokumen dalam penelitian ini antara lain regulasi-regulasi UU RI No 9 tahun 2009 tentang Pariwisata, Fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syari'ah, berbagai Perda yang dibuat Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan pariwisata, serta dokumen-dokumen lain yang dipandang relevan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data yang peneliti maksudkan adalah menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori tertentu untuk menghindari kekacauan data. Sedangkan penafsiran atau interpretasi data artinya memberikan makna terhadap data yang dianalisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antar berbagai konsep.

Penafsiran yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti sendiri, bukan merupakan kebenaran atau generalisasi. Oleh karena itu, kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai oleh orang lain dan diuji dalam berbagai situasi. Hasil penafsiran juga bukan merupakan generalisasi dalam artian kuantitatif, karena gejala sosial terlampaui banyak variabelnya dan terlampaui terikat oleh konteks tempat penelitian, sehingga generalisasi sulit dilakukan (Nasution, 1996: 126).

Untuk mempermudah kegiatan-kegiatan itu, informasi yang diperoleh berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data terlebih dahulu dicatat dalam catatan lapangan. Dalam catatan-catatan itu, peneliti membuat kode-kode tersendiri untuk memudahkan penggolongannya. Pemberian kode tersebut sangat membantu peneliti dalam proses analisis dan penyimpulan data yang diperoleh. Di samping itu, catatan tersebut juga sangat bermanfaat ketika diperlukan adanya revisi, sehingga memudahkan untuk mengetahui informasi mana yang kurang atau perlu dilengkapi.

Sebagaimana dikatakan Miles dan Huberman (1984 dalam Sugiyono, 2008:337) dan Nasution (1996:127), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, bukan hanya dilakukan pada tahap akhir penelitian. Proses analisis data penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, secara umum dikategorikan dalam langkah-langkah sebagai berikut ini.

3.5.1 Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data tersebut selanjutnya ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Penelaahan terhadap data tersebut dilakukan sejak awal pengumpulannya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan proses selanjutnya, mengingat data tersebut terus menerus bertambah. Upaya penelaahan disertai dengan mereduksi informasi-informasi yang dipandang tidak diperlukan. Selanjutnya data itu dirangkum, kemudian dipilah dan difokuskan pada hal-hal yang penting, dan

dicarikan tema atau polanya. Reduksi data bermanfaat dalam pemberian kode terhadap aspek-aspek tertentu. Dengan demikian, data tersebut tersusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

3.5.2 Display Data

Untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data hasil penelitian, penulis membuat matrik atau daftar berupa kolom-kolom sesuai tema-tema tertentu. Upaya itu dilakukan untuk dapat memilah data yang diperoleh sesuai kategori tertentu, dan tidak tercacaukan dengan terlalu banyaknya detail.

Pemilahan data, antara lain dilakukan terhadap informasi-informasi yang dituliskan dalam catatan lapangan. Sekalipun pada awalnya merupakan rangkaian informasi yang penulis dapatkan dari satu sumber (misalnya melalui wawancara), namun untuk mempermudah pengelompokkannya, informasi yang meliputi beragam topik itu dipilah sesuai kategorinya. Topik-topik itu selanjutnya diberi kode, sehingga mempermudah dalam pengkalsifikasian dan pemeriksaannya kembali. Cara seperti itu memungkinkan peneliti untuk menelaah data secermat mungkin guna memperoleh kesimpulan yang tepat.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penentuan pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, premis, dan sebagainya dimaksudkan peneliti untuk mencari makna terhadap informasi yang terkumpul. Dengan kata lain, upaya itu dilakukan dalam rangka mengambil kesimpulan (Nasution, 1996: 130; Moleong, 1990: 190-214). Untuk

dapat meyakinkan kesimpulan yang masih tentatif, kabur dan diragukan, penulis senantiasa melakukan verifikasi melalui pencarian informasi baru. Biasanya melalui wawancara secara tidak formal atau menelaah kembali dokumen atau sumber tertulis yang memuat informasi yang sejenis. Setelah merasa yakin atas kesimpulan tersebut, selanjutnya dilakukan penyusunan teori substansif melalui analisis yang komparatif.

BAB VI

DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Konsep dan Perkembangan Kepariwisata Bali

4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya terdiri atas Pulau Bali dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya. Luas seluruh wilayah Provinsi Bali adalah 5633 km². Bentuk Pulau Bali sendiri seperti kipas yang direntangkan. Di bagian tengah pulau ini terdapat pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Bentangan pegunungan ini sekaligus sebagai batas alam antara Bali bagian utara dan Bali bagian selatan. Gunung tertinggi di Bali adalah Gunung Agung (3.142 m dpl) yang terletak di Kabupaten Karang Asem. Gunung lainnya, yaitu Gunung Batur (1717 m dpl). Bali bagian utara memiliki dataran rendah yang sempit. Hal ini berbeda dengan Bali bagian selatan. Dataran rendah di Bali selatan menghampar dari Kabupaten Jembrana di barat sampai Kabupaten Karang Asem di timur. Sementara, di bagian ujung selatan terdapat semenanjung yaitu tanjung Benoa. Di Bali terdapat beberapa sungai, yang sebagian besar mengalir ke arah selatan. Sungai terpanjangnya dinamai Sungai Ayung, sedangkan sungai- sungai lainnya, yaitu sungai Pangi, Maran, Ho, dan Empas. Selain sungai, Pulau Bali juga memiliki beberapa danau, di antaranya Danau batur, Beratan, Buyan, dan Tamblingan (L. Somantri, tt: 2).

Penduduk asli Bali adalah suku bangsa Bali. Suku Bali secara umum dibagi menjadi dua pilahan, yaitu masyarakat Bali Aga dan masyarakat Bali Majapahit. Bali Aga berarti Bali pegunungan, mereka biasa juga disebut sebagai masyarakat Bali asli. Sedangkan masyarakat Bali Majapahit mendiami daerah dataran rendah di bagian selatan Pulau Bali. Bahasa mereka pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Bahasa Bali pegunungan dan Bahasa Bali dataran.

Tabel 4.1
Komposisi Penduduk Menurut Agama yang Dianut
di Provinsi Bali Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/ Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Kong- hucu	Lainnya
Jembrana	69.608	2.890	1.865	186.319	756	2	0
Tabanan	26.070	2.691	1.195	389.125	1.533	14	2
Badung	96.166	18.396	10.234	414.863	2.475	32	125
Gianyar	18.834	1.692	667	447.225	799	28	41
Klungkung	7.794	372	138	161.589	430	0	0
Bangli	2.185	197	56	212.325	113	1	0
Karangasem	16.221	398	197	379.113	334	1	4
Buleleng	57.467	3.132	916	557.532	3.127	97	15
Denpasar	225.899	34.686	16.129	499.192	11.589	252	95
Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019: 208

Sebagian besar masyarakat Bali menganut agama Hindu. Nilai-nilai ajaran agama ini tercermin dalam segala aspek kehidupan. Dalam struktur kemasyarakatan adat, masyarakat Hindu Bali memiliki pembagian kasta di dalam masyarakatnya sebagaimana juga masyarakat Hindu di India. Sekalipun penghormatan terhadap masing-masing kasta tersebut, terutama kasta tertinggi, tetap dipertahankan, namun

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, pembagian kasta ini tidak berlaku secara ketat kecuali dalam upacara-upacara keagamaan. Sekitar 90 persen penduduk Hindu Bali termasuk dalam kategori kasta Sudra atau kasta orang biasa.

Di samping itu, masyarakat Bali memiliki adat istiadat dan seni yang khas, yang merupakan manifestasi ajaran Hindu ke dalam aspek-aspek budaya dan peradaban mereka. Bagi masyarakat Bali, seni telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seni selalu dibutuhkan dan selalu ada dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, baik kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan lain-lain (L. Somantri, tt: 3).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan ekonomi di Provinsi Bali selain sektor pertanian dan industri kecil dan menengah (Wihadanto dan Firmansyah, 2013). Sejauh ini, sektor pertanian dan pariwisata, serta sektor pendukung pariwisata lainnya masih menjadi ujung tombak perekonomian Bali. Industri pariwisata merupakan salah satu motor penggerak utama ekonomi Bali. Sehingga, cerah atau muramnya kondisi ekonomi provinsi yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata ini akan sangat bergantung dari kinerja pariwisata secara umum (BPS Bali, 2019: 356).

Pada tahun 2018, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 318.574 orang (12,79%). Hal ini menunjukkan banyaknya usaha yang dapat digerakkan oleh sektor pariwisata. Usaha-usaha itu meliputi kegiatan biro perjalanan, transportasi, perhotelan, restoran/rumah makan, kesenian dan budaya daerah, industri kerajinan rakyat, pramuwisata (*guide*),

tempat hiburan dan rekreasi, pameran dan olahraga internasional yang diselenggarakan di daerah-daerah, serta kegiatan informal seperti pedagang acung dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja secara luas (padat karya). Dari data Sakernas 2018 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 501.235 orang (20,12%) (BPS Bali, 2019: 83).

4.1.2 Pariwisata Budaya dalam Bingkai *Trihita Karana*

4.1.2.1 Konsep Pariwisata Budaya Pulau Dewata

Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang mengandalkan potensi kebudayaan sebagai daya tarik utama (Nafila, 2013 dalam Prasodjo, 2017), serta sekaligus memberikan identitas bagi pengembangannya. Dalam jenis pariwisata ini wisatawan akan dipandu untuk mengenali sekaligus memahami budaya dan kearifan lokal masyarakat di tempat yang dikunjungi. Disamping itu, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan, tempat-tempat bersejarah sekaligus museum, representasi nilai dan sistem hidup masyarakat lokal, seni, serta kuliner khas yang mereka miliki.

Dalam kegiatan pariwisata budaya, setidaknya terdapat sepuluh elemen budaya yang menjadi daya tarik wisata yaitu: kerajinan, tradisi, sejarah dari suatu tempat/daerah, arsitektur, makanan lokal/tradisional, berbagai kesenian, cara hidup suatu masyarakat, agama, bahasa, dan pakaian lokal/tradisional (Geriya, 1995:103).

Elemen-elemen budaya tersebut sangat relevan dengan konsep kepariwisataan yang dikembangkan di Bali, yaitu pariwisata budaya.

Gambar 4.1

Pengrajin Handmade Patung Kayu di Desa Mas, Ubud – Bali.



Sumber foto: *balikami.com*

Konsep pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali merupakan salah satu keunikan yang khas bila dibandingkan dengan destinasi-destinasi lainnya yang ada di Indonesia. Keunikan ini tidak terlepas dari kehidupan keagamaan masyarakat Bali yang kental dengan nuansa Hindu yang mereka anut. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 58 tahun 2012 dikatakan, bahwa pelestarian budaya dan perlindungan (*heritage and protection*) adalah segala upaya untuk

mempertahankan dan melindungi nilai-nilai budaya Bali dari berbagai akibat karena pesatnya perkembangan pariwisata.

Gambar 4.2

Unsur-unsur Arsitektur Bali



Sumber foto: www.arsitektur.com

Pariwisata budaya merupakan aktivitas yang memungkinkan wisatawan untuk mengetahui dan memperoleh pengalaman tentang perbedaan cara hidup orang lain, merefleksikan adat dan istiadatnya, tradisi religiusnya dan ide-ide intelektual yang terkandung dalam warisan budaya yang belum dikenalnya. Pengembangan pariwisata budaya di Bali, antara lain dipicu oleh motivasi: 1) mendorong pendayagunaan produksi daerah dan nasional; 2) mempertahankan nilai-nilai budaya, norma, adat

istiadat dan agama; 3) berwawasan lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial (Arismayanti, 2006).

Gambar 4.3.

Tari Pendet, Kesenian Khas Bali



Sumber foto: *baabun.com*

Awal pembangunan keparwisataan Bali yang berwawasan budaya secara genaologis bisa dilacak pada era tahun 1930-an, ketika Belanda sudah berhasil menegakkan ketertiban dan keamanan di Bali, melalui serangkaian perang, seperti Perang Puputan Badung (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908). Pada tahun 1910, setelah situasi keamanan dipulihkan maka Bali masuk ke dalam *Pax Nederlandica*, yaitu tatanan politik ketatanegaraan persemakmuran semu di bawah

pimpinan Ratu Wilhelmina (Raja Belanda). Konsep persemakmuran semu ini direalisasikan dalam bentuk kebijakan politik etis yang pada prinsipnya mengakui adanya kewajiban moral dari pemerintah kolonial terhadap bangsa pribumi. Implikasi dari kebijakan yang baru ini membawa administrasi kolonial menyentuh ke tengah-tengah masyarakat dengan mengatasnamakan perdamaian, ketertiban hukum kolonial (*rust en order*) dan kemakmuran masyarakat yang dijajah (Ardika, dkk: 2015: 467-468 dalam Sedra, 2016:98).

Menurut Sedra (2016:99), salah satu program kebijakan politik etis adalah praktik Balinisasi (*Baliseering*), yang menggali eksotisme, konservatisme, keunikan dari tradisi, budaya dan sejarah Bali. Keunikan tradisi budaya dan keindahan alam serta lanskap kehidupan pedesaan dijadikan komoditas pariwisata untuk menarik para turis mancanegara berkunjung ke Bali. Tradisi, budaya, tinggalan-tinggalan arkeologi dan sejarah Bali kuno dijadikan sebagai ikon daya tarik wisata yang akan mengkonstruksi ruang Bali sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya (*historical cultural landscape/HCL*).

4.1.2.2 Filosofi *Tri Hita Karana*

Spiritualitas dan budaya merupakan benteng kokoh yang bisa menahan arus modernisasi dan globalisasi. Di Indonesia, spiritualitas dan budaya merupakan dua hal yang menyatu. Masyarakat menjalankan budayanya dalam bingkai agama, sementara agama masuk melalui budaya. Agama dan budaya ibarat sisi-sisi pada sebuah koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan sekalipun dapat dibedakan, Kekayaan warisan

budaya bangsa yang sudah mendapat pencerahan agama merupakan modal untuk membangun bangsa (Hutasoit, 2017: 157).

Gambar 4.4

Upacara Keagamaan di Pura Tanah Lot, Bali



Sumber foto: www.kintamani.id

Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafat *Tri Hita Karana* (THK) sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan (Pergub Bali No. 58/2012)

THK adalah sebuah konsep yang hidup dan dilakoni kalangan masyarakat Bali. Konsep ini berasal dari kata *Tri* yang artinya tiga sedangkan *Hita* artinya kebahagiaan dan *Karana* yang berarti penyebab. Secara keseluruhan THK dapat diartikan tiga penyebab terwujudnya kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan secara lahir dan batin. Ida Bagus Adi Laksana, Kabid Pengembangan dan Destinasi Wisata Provinsi Bali, menuturkan bahwa orang Bali sangat percaya pada konsep THK ini. Menurutnya, THK merupakan hubungan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan yang serasi dengan alam (hasil wawancara di Kantor Dinas Pariwisata Bali)

Falsafah THK, sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci *Bhagawad Gita III*, pada hakikatnya merupakan sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan, mengabdikan dan mengembangkan kasih sayang pada sesama manusia, serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan (Wiana, 2004:275 seperti dikutip Purana, 2016: 68). Konsep hidup yang sangat ideal ini diterapkan abad kesebelas, yang bertujuan menata kehidupan umat Hindu di Bali. Pada abad itu Mpu Kuturan mendampingi raja, menata kehidupan umat Hindu di Bali. Dalam *lontar* Mpu Kuturan dinyatakan bahwa Mpu Kuturanlah yang menganjurkan kepada raja untuk menata kehidupan di Bali, "*Manut Lingih Sang Hyang Aji*", yang artinya menata kehidupan berdasarkan ajaran kitab suci. Di setiap desa *pakraman*/desa adat dibangun *Kahyangan Tiga* untuk *sang catur warna*. Desa *pakraman* merupakan tempat/wadah *sang catur asrama* dan *catur warna* untuk mewujudkan tujuan

hidupnya mencapai *catur warga* (*dharma, artha, kama, dan moksah*). Di desa *pakraman* diciptakan suatu tatanan untuk mengembangkan cinta kasih pada alam lingkungan beserta isinya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Sarasamuscaya* (135) dengan istilah “*Prihen Tikang Bhuta Hita*”, yang mengandung arti dengan mengusahakan kesejahteraan semua makhluk, akan menjamin tegaknya *catur marga* atau empat tujuan hidup yang terjalin satu sama lainnya (Purana, 2016).

Catur Marga adalah empat jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*). *Pertama, Bhakti Marga Yoga*, yaitu jalan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud kasih sayang yang mendalam kepada-Nya. *Kedua, Jnana Marga Yoga*, merupakan jalan pengetahuan yang mengandung makna bahwa *moksa* atau tujuan hidup tertinggi manusia berupa penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa dicapai melalui pengetahuan tentang *Brahman*. *Ketiga, Karma Marga Yoga*, yaitu jalan pelayanan tanpa pamrih, yang membawa pencapaian menuju Tuhan melalui kerja tanpa pamrih. *Keempat, Raja Marga*, yaitu jalan yang membawa penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengekangan dan pengendalian diri serta pengendalian pikiran.

THK merupakan sebuah filosofi sekaligus *way of life* masyarakat Bali dalam segala aspek kehidupan (Riana, 2011). THK terdiri dari tiga dimensi yaitu: *parahyangan* (keharmonisan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (keharmonisan sesama manusia), dan *palemahan* (keharmonisan manusia dengan alam semesta atau lingkungan sekitar). Adapun uraian dari tiga dimensi THK adalah sebagai berikut ini.

1. *Parahyangan*

Parahyangan atau keharmonisan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah segala upaya yang dilakukan oleh manusia dengan cara yang baik untuk tercapainya keharmonisan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Upaya atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya mengedepankan prinsip-prinsip prikemanusiaan, dengan rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Mengarah yang lebih spesifik lagi yaitu menjalankan ajaran kebaikan dari agama dengan mementingkan perdamaian antar sesama manusia di dunia.

Gambar 4.5

Menyajikan Canang Sari



Sumber foto: *sejarahharirayahindu.blogspot.com*

Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, menurut Adi Laksana (dalam wawancara penelitian ini) merupakan ungkapan rasa syukur orang Bali atas anugerah kehidupan yang telah diberikan-Nya. Ungkapan syukur itu diekspresikan dengan beragam upacara ritual: dari ritual harian seperti menyajikan *canang sari* (merupakan upak ra/perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan tiap harinya), upacara kelahiran hingga kematian, dan upacara-upacara hari-hari besar agama Hindu Bali.

2. Pawongan

Pawongan atau keharmonisan antara sesama manusia, merupakan segala upaya yang dilakukan oleh manusia dengan cara-cara yang baik untuk mewujudkan keharmonisan antara sesama manusia di Indonesia khususnya di Bali. Segala upaya yang dimaksud juga memperhatikan prikemanusiaan, saling menghormati antar sesama manusia walaupun terdapat bermacam macam perbedaan, saling menghargai sesama manusia. Selain itu dapat juga dilakukan dengan saling tolong menolong dengan tujuan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan sesama manusia.

Keharmonisan antar sesama manusia, sebagaimana tersirat dalam penuturan Adi Laksana, terlihat dari kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda-beda pada masyarakat Bali. Saling menghormati dan menghargai upacara keagamaan, saling membantu, memberi dan bekerjasama dalam aspek-aspek kehidupan bermasyarakat di antara penganut agama yang berbeda, menjadi hal yang membudaya di Bali. Potensi-potensi disintegrasi sebagaimana fenomena yang terlihat secara

nasional belakangan ini, lanjut Adi Laksana, sama sekali tidak tampak dalam kehidupan masyarakat di Bali.

3. *Palemahan*

Palemahan atau menjaga keharmonisan dengan alam atau lingkungan hidup, mengandung arti segala upaya manusia dengan cara-cara yang baik untuk mewujudkan keharmonisan dengan alam semesta beserta isinya, dengan tidak bertentangan dengan norma, undang-undang, adat istiadat dan ajaran agama. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab manusia agar dapat hidup dengan tentram, aman dan damai. Keterkaitan *Palemahan* dengan pelestarian lingkungan yaitu adanya kesamaan cara melestarikan alam semesta.

Adi Laksana menggambarkan, bahwa dalam nilai-nilai keyakinan agama Hindu, berbagai kerusakan dan bencana alam yang kerap terjadi akhir-akhir ini di Indonesia merupakan akibat tangan-tangan jahil manusia yang serakah. Perilaku merusak itu, menurutnya, merupakan pelanggaran atas salah satu ajaran harmoni yang ada dalam filsafat THK, yaitu *palemahan* (keharmonisan dengan alam). Untuk menjaga harmoni dengan alam, lanjut Adi Laksana, masyarakat Hindu Bali memiliki satu dharma yang disebut *dana punia*. *Dana punia* adalah pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai suatu sarana untuk meningkatkan sradha dan bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dharma ini, umat Hindu dididik untuk tidak serakah.

4.1.3 Sejarah dan Perkembangan Kepariwisata di Bali

4.1.3.1 Tonggak Awal Pariwisata Bali

Mengenai kapan persisnya sejarah pariwisata Bali bermula, belum ada kesepakatan di kalangan para ahli. Sehingga tidak ada kesepakatan kapan Bali mulai dikunjungi wisatawan, atau kapan Bali dirancang sebagai daerah untuk dikunjungi. Namun demikian, di tengah belum adanya kesepakatan itu, I Nyoman Darma Putra (Putra, 2017:v) dalam pengantar bukunya menuturkan, bahwa terdapat tiga tonggak penting yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan awal mula pariwisata Bali.

Pertama, tahun 1902, ketika hadirnya ‘turis pertama’ ke Bali, yaitu H. van Kol, seorang anggota parlemen Belanda. Ia bertamasya ke Indonesia termasuk Bali dengan uang sendiri, tidak menggunakan uang perjalanan dinas, dengan tujuan pelesiran. Sekembali dari perjalanan wisata itu, Kol menulis catatan perjalanan setebal 826 halaman, berjudul *Uit Onze Kolonien* (Dari Koloni Kita). Kunjungannya sendiri mungkin kurang kuat untuk dijadikan tonggak awal pariwisata Bali, tetapi buku yang diterbitkannya bisa dilihat sebagai materi promosi awal Bali sebagai daerah wisata.

Sebetulnya, jauh sebelum van Kol datang sebagai wisatawan, sekitar tahun 1500 seorang peziarah Sunda bernama Bhujangga Manik (Prabu Jaya Pakuan) sudah melaksanakan perjalanan spiritual ke Bali, lewat pantai utara Jawa. Kesan-kesan perjalanannya ditulis dalam puisi naratif yang masih ada sampai sekarang. Dalam tulisannya itu, Bhujangga Manik menyampaikan bahwa Bali tidak ideal untuk semadi

karena ramai dan bising (Teeuw 1998:13 dalam Putra, 2017: vi). Nemun sulit menganggapnya sebagai tonggak awal perkembangan pariwisata Bali, karena setelah perjalanan ini, tidak diketahui ada tonggak perkembangan wisata selanjutnya. Berbeda halnya dengan kunjungan van Kol. Kisah perjalanan yang ditulisnya bersambung erat dengan kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda dalam melestarikan kebudayaan dan mempromosikan Bali sebagai daerah wisata.

Kedua, tahun 1910, ketika muncul gagasan dan pendirian membangun Museum Bali di Denpasar. Museum ini dimaksudkan untuk menyelamatkan artefak budaya Bali agar tidak lenyap ditelan waktu. Museum ini baru dibuka untuk umum tahun 1932. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai tempat pelestarian, museum ini tentu saja memiliki sejumlah fungsi lain termasuk daya tarik wisata. Tahun pembukaan yang berselang lama ini menandakan lama waktu proses pembangunannya. Hal ini terjadi karena kesulitan biaya dan bencana gempa bumi di Bali tahun 1917. Sampai sekarang, Museum Bali masih hadir sebagai salah satu daya tarik wisata di kota Denpasar. Lebih dari itu, sebagai yang pertama lahir, Museum Bali menjadi sumber inspirasi pendirian museum lain di Bali yang semuanya sama-sama menjadi salah satu pilar perkembangan pariwisata budaya Bali.

Ketiga, tahun 1914, ketika perusahaan *Koninklijke PaketvaartMaatschappij* (KPM) mendirikan kantor Oicial Tourist Bureau di Bali sebagai cabang dari kantor yang sama di Batavia yang didirikan tahun 1908 (Picard 1996:23 dalam Putra, 2017: vi). KPM mendapat subsidi dari pemerintah kolonial Belanda sebagai badan yang bergerak dalam bidang pelayaran termasuk angkutan wisata ke Bali. Tahun 1915,

KPM sudah memiliki kantor di Denpasar, lokasinya di selatan Alun-alun Puputan Badung, sekitar lokasi Kantor Garuda Indonesia sekarang. Tahun 1926, KPM mendirikan Bali Hotel di Jalan Veteran, yang sampai sekarang masih beroperasi nama Inna Bali Hotel. Langkah KPM sangat sistematis dalam mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata, mulai dari pendirian biro wisata, memperbanyak frekuensi pelayaran ke Bali, menerbitkan brosur promosi, hingga mendirikan akomodasi mewah Bali Hotel.

Antara kehadiran turis pertama tahun 1902, pendirian museum Bali 1910, dan kehadiran *Oicial Tourist Bureau* milik KPM di Bali tahun 1914, serta pendirian Bali Hotel, bisa dianggap sebagai rentang tonggak awal pariwisata Bali. Andaikan tonggak awal pariwisata Bali diambil tahun 1914, saat pendirian biro wisata oleh KPM di Bali, berarti sekarang ini usia pariwisata Bali sudah 100 tahun lebih. Telah banyak terjadi perkembangan dan perubahan dalam rentang waktu seabad, walau intensitasnya dalam tiap-tiap waktu atau dekade berbeda-beda (Putra, 2017).

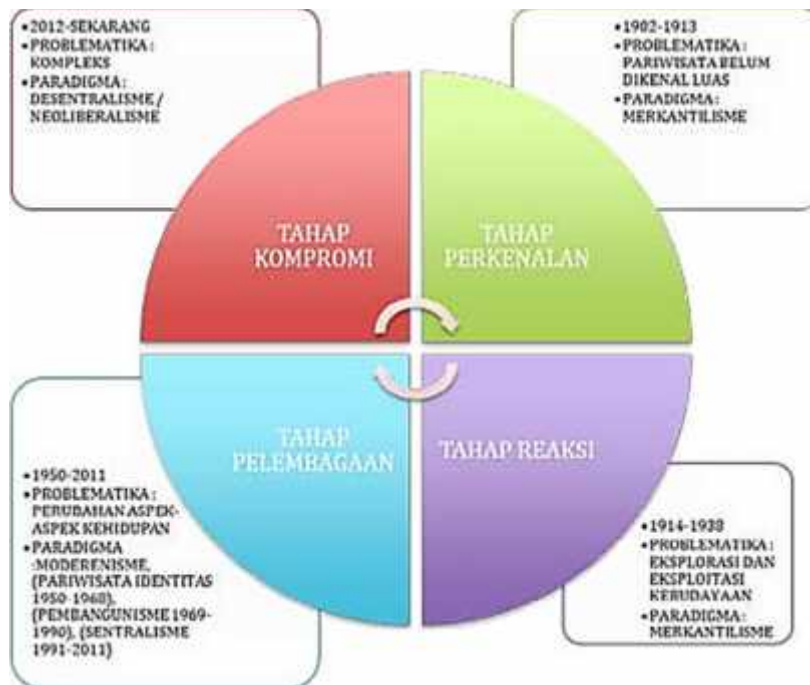
4.1.3.2 Tahap-tahap Perkembangan Pariwisata Bali

I Putu Anom, dkk. dalam sebuah tulisannya yang berjudul “*Turismemorfofis: Tahapan Selama Seratus Tahun Perkembangan dan Prediksi Pariwisata Bali*” (Anom, 2017) memaparkan tahap-tahap perkembangan pariwisata Bali yang sudah berlangsung selama seratus tahun lebih itu. Pentahapan itu disusun dengan melihat empat kriteria sebagai penanda penting setiap periode, yang terdiri dari dikursus, institusi, tokoh, serta paradigma dan problematikanya. Berdasarkan empat kriteria

sebagai penanda itu, I Putu Anom dkk. membagi perkembangan pariwisata Bali ke dalam empat periode sebagai tahap-tahap pengembangan pariwisata Bali. Tahap-tahap tersebut meliputi: tahap pengenalan (1902 – 1913), tahap reaksi (1914 – 1938), tahap pelembagaan (1950 – 2017), dan tahap kompromi (2012 – sekarang).

Gambar 4.6

Perkembangan Pariwisata Bali sebagai Turismemorfosis



Sumber: Anom, dkk, 2016

1. Tahap Pengenalan, 1902 – 1913

Diskursus yang berkembang pada periode ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintah Hindia Belanda untuk membangun daerah jajahannya dan memperbaiki

citra mereka setelah banyak melakukan peperangan. Pada waktu itu aktivitas berlibur merupakan kegiatan yang menggembirakan dan sangat prospektif bagi kegiatan dunia usaha. Pada saat ini, konsep kepariwisataan sudah muncul, sekalipun belum disebut sebagai industri pariwisata.

Dalam periode pengenalan tersebut, masyarakat Bali belum menyadari bahwa mereka dijadikan objek. Mereka belum memahami potensi-potensi pariwisata yang dimiliki. Alih-alih, masyarakat Bali justru merasa aneh dan secara lugu mulai berinteraksi. Pada waktu itu, kebudayaan, alam, kepolosan dan keluguan orang Bali yang dirasakan oleh orang Eropa semakin membuat banyak orang Eropa tertarik datang ke Bali.

Heer H. van Kol disebut sebagai wisatawan yang pertama mengunjungi Bali. Kisah perjalanannya ia tulis dalam sebuah buku dan diterbitkan dengan judul *Uit Onze Kolonien* (Dari Koloni Kita) di Leiden (Belanda) tahun 1902. Selain Kol, terdapat pula pembuat citra Bali pada masa itu, seorang pelukis bernama W.O.J. Nieuwenkamp dan seorang dokter bernama Gregor Krause. Krause antara tahun 1912 – 1914 memainkan peran utama dalam promosi pariwisata Pulau Bali. Pada tahun 1920-an ia menerbitkan sebuah buku berisi hampir 400 foto, berjudul *Bali 1912*. Buku itu disambut hangat publik Eropa dan diterbitkan ulang berkali-kali (Anom, 2017:4-6).

2. Tahap Reaksi 1914 – 1938

Pengembangan sektor pariwisata di Bali mulai dirintis dengan dibukanya akses transportasi darat, laut dan udara di Singaraja. Lontar dan warisan budaya lain mulai diperlihatkan kepada kaum sarjana, juga adanya pencegahan agar benda-benda warisan budaya tidak dijual kepada turis sebagai souvenir. Di samping itu, juga dilakukan usaha-usaha memperkenalkan kearifan lokal Bali dengan mengirim misi kesenian ke luar negeri. Usaha itu antara lain dilakukan oleh Raja Ubud, Cokorde Gde Raka Sukawati dengan mengirim misi kesenian ke Paris Colonial Exposition pada tahun 1931. Para seniman yang beranggotakan 51 orang menunjukkan keahliannya di Anjungan Hindia Belanda. Sejak saat itu Bali semakin dikenal dengan pencitraan yang semakin baik di Eropa (Anom, 2017:6).

Paradigma ekonomi merkantilisme dilakukan oleh Pemerintah Belanda dalam komersialisasi Bali sebagai obyek wisata. Pada tahun 1926 *Travel Agent* Lissone Lindemend (LISIND) yang berpusat di Belanda membuka cabangnya di Jalan Majapahit Nomor 2 Jakarta. Pada tahun 1928, ia berganti nama menjadi Nitour (*Nederlansche Indische Touristen Bureau*) dan bersama-sama travel agent KNILM memonopoli kegiatan pariwisata di Indonesia (Yoeti, 1996). Orang-orang Bali, Cina, Essex dan Huson serta KPM (*Koninklijke Paketvaar Matschappij*) mendominasi wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Meskipun muncul reaksi-reaksi atas usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi kebudayaan Bali dengan paradigma merkantilisme tersebut, namun di sisi usaha-usaha ini memberi keuntungan bagi para seniman Bali. Pada saat itu, Walter Spies

bersama teman-temannya melakukan komodifikasi beragam kesenian tradisional Bali untuk kepentingan wisatawan termasuk pemasarannya. Peran Walter Spies ini justru membangkitkan upaya revitalisasi kesenian tradisional Bali. Sampai pada tahap ini, perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya Bali, memasuki masa suram seiring meletusnya perang dunia II pada tahun 1939, yang disusul dengan masa pendudukan Jepang 1942—1945 (Anom, 2017:7-8).

3. Tahap Pelembagaan (1950 - 2011)

Setelah Indonesia merdeka dan kedaulatannya diakui Belanda, terjadi Indonesianisasi usaha-usaha dagang di Bali. Semangat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat ini didominasi oleh warga pribumi dan masyarakat keturunan etnis Cina. Dalam bidang kepariwisataan, minat Presiden Soekarno terhadap pariwisata dapat dilihat dari keputusannya membangun Bali Beach Hotel tahun 1963 dan Lapangan Terbang Ngurah Rai.

Pada skala nasional, di tingkat pusat lahir Yayasan Tourisme Indonesia (YTI), Dewan Tourisme Indonesia (DTI), dan Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI). Para pelaku usaha pariwisata di Bali tergabung ke dalam keanggotaan Lembaga-lembaga tersebut. Di samping itu, didirikan juga institusi-institusi lokal di Bali. Seperti Gabungan Tourisme Bali yang berganti nama menjadi Bali Tour sebagai institusi yang mengkoordinir berbagai toko, hotel, dan sopir angkutan penumpang.

Pada periode ini, selain pengusaha-pengusaha pariwisata dari etnis Cina dan Belanda (beberapa yang masih di Bali untuk berbisnis), juga bermunculan pengusaha-

pengusaha lokal yang terdiri dari mantan pejuang kemerdekaan dengan paham nasionalis, paham komunis, penganut paham sosialis, dan keluarga berkasta atas. Seiring kegairahan usaha pariwisata tersebut, pada tahun 1963 dibangun dua proyek besar, yaitu perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai dan Bali Beach Hotel. Kedua proyek ini merupakan titik awal pembangunan Bali secara besar-besaran menjadi daerah pariwisata Indonesia bagian tengah yang kelak dilanjutkan oleh Presiden Suharto membangun kawasan Nusa Dua mulai tahun 1970-an (Putra, 2012 dalam Anom, 2017:9).

Dukungan besar Presiden Soekarno kepada Bali untuk pembangunan kepariwisataan diupayakan secara harmonis oleh pemerintah daerah agar dapat diwujudkan bersama para praktisi pariwisata Bali. Pengembangan pariwisata pada masa ini tidak bisa lepas dari adanya masalah, terutama terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan dan iklim politis serta keamanan yang belum kondusif. Perbedaan ideologi politik yang ekstrem diantara elit dan *grass root*, pemberontakan Marsidi, meletusnya Gunung Agung, aksesibilitas, SDM dan pengelolaan industri pariwisata Bali sendiri menjadi masalah-masalah yang berkembang saat itu (Anom, 2017:10)

Pada masa peralihan Orde Lama (ORLA) ke Orde Baru (ORBA), Presiden Suharto dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1968, menyatakan bahwa tahap pertama yang akan dilakukannya adalah memberikan perhatian khusus terhadap kepariwisataan Bali. Perencanaan pariwisata tetap disusun meneruskan usaha-usaha yang sudah dikembangkan periode sebelumnya. Pada saat itu, Presiden

Suharto memesan penyusunan rencana induk kepada *Societe Centrale four l'Equipment Touristique Outre-Mer* (SCETO).

Pada tahun 1973 diadakan seminar Pariwisata Budaya di Hotel Denpasar. Seminar tersebut bertujuan untuk merumuskan identitas pariwisata Bali. Setahun setelahnya, identitas pariwisata budaya Bali sudah didapat dan menjadi contoh di Indonesia dan modal dasar pembangunan pariwisata Bali kedepan. Secara cepat, pada tahun 1974 DPRD Bali mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 Tentang Pariwisata Budaya.

Pihak-pihak yang memiliki peran dalam membesarkan pembangunan pariwisata Bali pada masa ini antara lain: Gubernur Bali Soekarmen, Gubernur Bali Ida Bagus Mantra dan jajarannya saat itu, tokoh-tokoh agama Hindu, akademisi dan para mantan pejuang yang eksis menggeluti sektor pariwisata. Di samping itu, juga para investor besar asal Jakarta dan luar negeri yang memiliki jejaring dengan pemerintah pusat. Begitu pula dengan para “*broker seni tradisional*”, pedagang acung, staf/karyawan hotel, dan mereka yang bergerak di sektor “jasa kecil-kecilan” dari era sebelumnya (1960-an) menambah kehadiran pengusaha-pengusaha lokal yang sudah ada sebelumnya. Kebanyakan dari mereka mampu menunjukkan eksistensi bisnisnya di tahun 1975 hingga 1990-an.

Periode ini memiliki paradigma pembangunanisme ketika sektor pariwisata mulai menjadi *leading sector* pembangunan ekonomi di Bali. Bahkan dalam skala nasional Bali tidak hanya dijadikan sebagai pusat daerah tujuan wisata Indonesia bagian tengah tetapi juga merupakan daerah primadona yang memberikan devisa

nasional terbanyak di bidang pariwisata. Pada saat inilah, fenomena baru muncul, yaitu mulai terjalin hubungan baik secara personal antar wisatawan mancanegara dengan orang Bali. Bentuknya antara lain perkawinan antar bangsa, pola anak asuh (anak orang Bali dibiayai oleh wisatawan mancanegara), sampai kepada orang Bali dipercaya untuk mengelola dana yang dimiliki wisatawan untuk membuka usaha di Bali (Anom, 2017:10-12).

Krisis politik-ekonomi tahun 1998 yang mengawali era reformasi telah membawa banyak perubahan di Indonesia, termasuk di Bali. Secara politik ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 1999 terutama di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Sejak itu, maka dimulailah babak baru kepariwisataan di Bali yang semakin kompleks (Megawati berperan besar dalam program *Recovery Bali* pasca-bom 12 Oktober 2002).

Setelah pengesahan Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) Tahun 2010-2025. PP Nomor 50 Tahun 2011 menetapkan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia. Disusul dengan perencanaan *MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)* mencegah disparitas mencolok dari daerah-daerah di Indonesia.

Memasuki era Reformasi sampai tahun 2011, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, perusahaan transnasional, perusahaan transinternasional,

organisasi-organisasi kepariwisataan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai institusi penopang. Begitu pula peran elite-elite lokal yang duduk di kursi eksekutif dan legislatif sebagai implikasi dari otonomi daerah. Peran konglomerasi Jakarta dan kapital asing terasa semakin “memaksakan kehendak”, yang melahirkan banyak institusi sebagai organisasi-organisasi kepariwisataan di Bali. Problematika pariwisata Bali pada periode ini adalah terjadi banyak perubahan sosial-budaya dan banyak variasi daya tarik wisata dan kreasi kesenian maupun produk-produk seperti kerajinan yang lahir namun ternyata banyak pula obyek wisata yang berjaya di tahun 1980-an tidak mampu bertahan (Anom, 2017:12-13).

4. Tahap Kompromi, 2012 – Sekarang

Pengembangan pariwisata secara besar-besaran, seperti penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan reklamasi Teluk Benoa, menimbulkan kekhawatiran orang Bali akan tersingkir karena pertumbuhan pariwisata. Namun, di sisi lain, terdapatnya juga diskursus positif seperti giatnya pengembangan desa wisata, wisata alam, *sport tourism*, wisata tirta dan jenis wisata lain yang mulai berkembang di daerah yang sebelumnya pariwisata tidak menjadi andalan.

Pemerintah pusat dan daerah, perusahaan transnasional, perusahaan transinternasional, organisasi-organisasi kepariwisataan, organisasi masyarakat, dan LSM bersemangat untuk pengembangan desa wisata, pengelolaan daya tarik wisata oleh desa adat dan ragam aktivitas wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dalam

ragam bentuknya (desa dinas, desa pekraman, kelompok sadar wisata/Pokdarwis, badan pengelola atau badan usaha milik desa/Bumdes). Akselerasi sektor pariwisata dilakukan untuk mampu mewujudkan target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019, sebesar 20 juta orang. Kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah pusat, antara lain Presiden Joko Widodo yang tampaknya fokus terhadap pembangunan infrastruktur seperti aksesibilitas dan fasilitas di daerah-daerah.

Paradigma pada tahap ini adalah desentralisme/neoliberalisme ketika jejaring konglomerasi nasional dan global berupaya semakin mengendalikan Bali atas dasar pertumbuhan ekonomi. Tidak ada jalan lain bagi masyarakat Bali untuk berkompromi meskipun ada riak-riak yang menginginkan perlawanan. Dengan modal sosial-religius masyarakat Bali sangat kuat, dengan massifnya pembangunan kepariwisataan ini, diprediksi kebudayaan Bali akan tetap bertahan sebagai *living culture*. Di samping itu, masyarakat Bali adalah masyarakat yang plural dan terbuka yang memberikan reaksi dan respons positif terhadap segala perubahan, khususnya perubahan sosial ekonomi. Produk pariwisata tidak hanya mengandalkan pariwisata budaya tetapi juga pariwisata alam dan pariwisata buatan akan berkembang secara massif. Diperkirakan *MICE* dan *New tourism* seperti wisata belanja dan wisata keluarga akan menjadi *trend* pariwisata Bali di masa depan (Anom, 2017:15-17).

4.2 Respons Kepariwisata Bali terhadap Wacana Pariwisata Halal

Sejak tahun 2014, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkomitmen untuk mengembangkan *Wonderful Indonesia* sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di

dunia. Kemenpar membentuk Tim Percepatan Wisata Halal, dan mengembangkan tiga destinasi utamanya, yakni Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Perhatian pada wisata halal dan kesungguhan Indonesia untuk mengembangkannya dipicu oleh adanya pertumbuhan pasar pariwisata halal dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan cukup pesat. Di samping itu, sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber utama pemasukan devisa, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (*halal lifestyle*).

Komitmen Kemenpar ini membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Wonderful Indonesia memborong 12 awards sekaligus dari 16 kategori yang dikompetisikan melalui *World Halal Tourism Award 2016*. Indonesia sukses bersaing dengan 116 negara, dan 1,8 juta voters. Dari tahun ke tahun, legenda juaranya selalu Malaysia dan Turki, sejak 2016 itu Indonesia yang merajai. Pariwisata halal Indonesia berhasil menorehkan prestasi dikancah Internasional. Bahkan, pada tahun 2019, setelah lima tahun sejak pertama kalinya bergabung di *Global Muslim Travel Index* (GMTI), Indonesia berhasil meraih peringkat teratas versi *Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2019* mengalahkan negara-negara lain seperti Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Informasi-informasi itu semakin menyemarakkan wacana tentang pariwisata halal di Indonesia. Bali, sebagai destinasi wisata utama tanah air, tidak luput menjadi bagian yang diwacanakan dalam pengembangan wisata halal ini. Wacana tentang

menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia mengemuka, terutama pada tahun 2018, ketika hal itu disampaikan salah satu kandidat wakil presiden RI yang bertarung di ajang Pemilu Presiden 2019. Pro-kontra atas wacana itu bermunculan, dan karena disampaikan dalam suasana politis, maka suara-suara yang mendukung dan menolak rencana itu pun tidak jarang yang bernada politis.

Ungkapan penolakan menjadikan Bali sebagai destinasi wisata halal antara lain dikemukakan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau sering disapa Cok Ace. Menurutnya, konsep pariwisata halal tidak sesuai dengan karakter dan potensi yang ada di Bali. Konsep itu lebih layak dikembangkan ke dalam kultur yang condong kearah kebudayaan Timur Tengah. Sehingga dari sana ada potensi untuk menarik kedatangan wisatawan Timur Tengah ke kawasan itu. Sementara itu, lanjut Cok Ace, potensi wisatawan Timur Tengah bagi Bali sangat kecil, sehingga secara pertimbangan ekonomi tidak masuk akal melakukan investasi besar-besaran membangun pariwisata halal di Bali.

Karakter pariwisata di Bali dikenal dengan pariwisata budaya dan juga dikenal dengan kearifan lokal masyarakat Bali, serta secara filosofis dilandasi oleh ajaran Hindu. Wisatawan dari negara-negara Barat itu datang ke Bali karena tertarik dengan keunikan kebudayaan Bali. Sedangkan wisatawan dari negara-negara Asia berkunjung ke Bali karena mereka merasakan adanya hubungan kultural yang dekat dengan Bali. Cok Ace merujuk pada data wisatawan yang datang mengunjungi pariwisata di Bali tahun terakhir ini adalah wisatawan yang datang dari negara-negara

Asia seperti Cina, Jepang, Korea, Taiwan dan India, serta negara-negara Barat seperti Australia, Inggris, Amerika, Jerman, Perancis dan Belanda.

Bali mengusung konsep pariwisata budaya. Bali dikenal didunia itu karena keunikan budaya yang dimilikinya, sehingga, masyarakat tidak mau keluar dari konteks budaya yang sudah menjadi ciri khasnya itu. Di tataran global, branding itu membuat Bali dikenal sebagai *The Last Paradise*, surga terakhir yang dihuni oleh pemeluk Hindu yang selalu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Pencipta dan Alam-nya. Branding ini bisa rusak jika dikembangkan konsep pariwisata yang tidak cocok dengan keunikan dan karakter budaya Bali (dikutip dari www.tagar.id/bali-menolak-wacana-wisata-halal-sandi-ini-alasannya).

Seolah menegaskan apa yang disampaikan Ardana Sukawati di atas, Menteri Pariwisata Arief Yahya memandang bahwa branding wisata halal tidak perlu diterapkan untuk Bali. Menurutnya, positioning Bali sebagai pariwisata budaya berbasis Tri Hita Karana itu sudah sangat kuat, sehingga tidak perlu lagi wisata halal. Sebaliknya, Arief berharap, branding destinasi wisata budaya Bali terus dipertahankan dan dilestarikan. Wisata budaya Bali sudah terbukti menjadi branding yang paling ampuh. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan internasional yang pernah diraih Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia (www.tagar.id/menpar-arief-yahya-bali-tidak-perlu-branding-wisata-halal)

Wakil Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali, I Nyoman Sukma Ariada turut memberikan tanggapan terhadap wacana ini dari perspektif akademisnya. Menurutnya, Bali sudah lekat dengan filosofi Tri Hita Karana. Oleh

karena itu, tidak bisa dipaksakan ada wisata halal di Pulau Dewata. Tri Hita Karana ini merupakan tatanan yang sudah disepakati di Bali secara turun temurun yang memberikan kekhasan kepada Bali. Hal yang sama terjadi dengan daerah lain, misalnya Aceh dengan nuansa Islam Nusantaranya atau Yogya dengan akar budaya Jawanya. Setiap daerah hidup dan berjalan dengan kekhasannya masing masing. Sukma menambahkan, tanpa predikat wisata halal pun Bali selama ini sudah memberikan keleluasaan yang cukup bagi wisatawan dengan latar belakang apapun, termasuk Muslim. Dia memberikan contoh tentang kemudahan mencari masjid ataupun restoran halal di Pulau Dewata tersebut (travel.detik.com/travel-news/d-4446526/bali-tak-bisa-dipaksa-jadi-destinasi-wisata-halal)

Komentar Nyoman Sukma dikuatkan dengan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra. Menurutnya, meski tidak dilabeli dengan destinasi pariwisata halal, Bali menjadi Muslim Friendly Tourism. Kunjungan wisman asal Timur Tengah memang masih kecil dibandingkan Cina, Australia, dan Jepang, namun grafiknya terus meningkat. Pada tahun 2016 peningkatannya mencapai 56 persen dibanding tahun sebelumnya.

Di Bali terdapat ratusan restoran halal, juga hotel-hotel berkonsep halal. Bali sangat menerima siapapun yang ingin berkunjung, termasuk wisatawan Muslim, dan menyediakan apapun yang mereka butuhkan. “Tapi kami tidak mengatakan bahwa Bali adalah halal tourism destination”, tegas Yuniartha (republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/17/04/04/onve6d335-bali-adalah-wilayah-muslim-friendly-tourism)

Tabel 4.2

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali
Menurut Kebangsaan, 2014-2018

Negara Asal	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ASEAN	483.487	422.986	416.428	379.264	553.728
Pertumbuhan (%)	15,66	-12,51	-1,55	-8,92	46,00
1. Malaysia	223.205	190.381	178.377	165.396	194.760
2. Philipina	32.727	33.906	39.411	47.815	88.344
3. Singapura	178.174	146.660	135.902	124.779	144.549
4. Thailand	30.247	28.214	31.828	33.736	47.367
5. Asean lainnya	19.134	23.825	30.910	7.538	78.708
II. ASIA	1.236.816	1.424.995	1.839.892	2.193.676	2.410.620
Pertumbuhan (%)	24,25	15,21	29,12	19,23	9,89
1. Hongkong	35.552	38.980	42.096	35.383	38.850
2. India	88.049	119.304	180.770	264.516	353.894
3. Jepang	217.159	228.185	232.151	249.399	261.666
4. Korea Selatan	145.498	152.866	143.084	161.765	143.581
5. Taiwan	113.132	124.593	124.095	110.769	106.058
6. Tiongkok	585.922	688.469	975.152	1.356.412	1.361.512
7. Asia lainnya	51.504	72.598	142.544	15.432	145.059
III. AMERIKA	177.940	214.518	184.373	190.947	362.357
Pertumbuhan (%)	8,06	20,56	-14,05	3,57	89,77
1. Amerika Serikat	111.610	133.763	169.288	189.814	236.578
2. Kanada	37.532	45.079	1.899	891	66.619
3. Amerika Lainnya	28.798	35.676	13.186	242	59.160
IV. EROPA	736.188	842.436	1.151.925	1.675.317	1.406.086
Pertumbuhan (%)	3,34	14,43	36,74	45,44	-16,07
1. Perancis	128.288	131.451	164.723	176.710	195.734
2. Jerman	105.467	120.347	153.425	176.470	185.863
3. Belanda	76.082	81.929	95.449	101.241	108.429
4. Inggris	127.013	167.628	218.928	240.633	270.789
5. Rusia	72.127	51.873	66.744	94.331	111.610
6. Eropa Lainnya	227.211	289.208	452.656	885.932	533.661
V. OSEANIA	1.050.422	1.042.001	1.202.805	1.062.855	1.282.886
Pertumbuhan (%)	17,68	-0,80	15,43	-11,64	20,70
1. Australia	988.786	966.869	1.117.933	1.062.039	1.169.215
2. Selandia Baru	58.142	68.665	1.960	807	111.967
Oseania Lainnya	3.494	6.467	82.912	9	1.704

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI. AFRIKA	18.137	27.830	8.398	7.965	54.796
Pertumbuhan (%)	-6,44	53,44	-69,82	-5,15	587,96
1. Afrika Selatan	9.744	13.984	163	63	33.318
2. Afrika Lainnya	8.393	13.846	8.235	7.902	21.478
VII. CREW	63.648	27.069	124.115	187.715	-
Jumlah	3.766.638	4.001.835	4.927.937	5.697.739	6.070.473
Pertumbuhan (%)	14,89	6,24	23,14	15,62	6,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2019

Memahami Penolakan Wacana Halal Tourism di Bali

Amirsyah Oke, seorang pemerhati ekonomi dari UGM, mengemukakan pendapat mengenai pro-kontra terkait wacana wisata halal di Bali. Beberapa pendapat mendukung wacana tersebut dengan menunjukkan keuntungan yang bisa diperoleh Bali sebagaimana halnya beberapa negara mayoritas non Muslim yang menerapkan konsep wisata halal tersebut, seperti di China, Hongkong atau beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Menurutnya, perbandingan tersebut tidaklah tepat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya non Muslim, tentu saja wajar jika menerapkan program wisata halal untuk menarik turis muslim utamanya dari negara-negara mayoritas muslim. Di Negara-negara tersebut bisa dikatakan hampir tidak ada fasilitas untuk umat Islam karena penduduknya yang beragama Islam sangat sedikit. Tersedianya fasilitas halal jelas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Muslim untuk datang ke negara-negara tersebut.

Berbeda halnya dengan Bali. Meskipun mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, namun Bali merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenal dunia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Penduduk Bali yang beragama Islam pun tidaklah sedikit, bahkan di kawasan tertentu jumlahnya sangat banyak. Jika ada program pengembangan wisata halal, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan dan pemikiran negatif terkait Bali yang terkenal sebagai wilayah yang aman, tenang, toleran untuk semua penduduknya meskipun berbeda-beda agama.

Jumlah penduduk muslim di Bali sekitar 520 ribu jiwa atau kira-kira 13,4% dari 3,9 juta total penduduk (sensus penduduk 2010). Meskipun minoritas, namun secara jumlah tidaklah sedikit, bisa dikatakan 1 dari 8 orang di Bali adalah Muslim. Hingga saat ini, tidak ada komplain berarti terkait kehidupan penduduk muslim di Bali. Mereka tetap bisa bekerja seperti biasa, tidak kesulitan dalam mengkonsumsi makanan halal, dan tetap bebas beribadah sesuai ajaran agama Islam.

Oleh karena itu, jika penduduk muslim di Bali saja tidak kesulitan, sudah barang tentu wisatawan Muslim yang berkunjung ke Bali pun juga tidak akan kesulitan. Hal ini akan berbeda jika mereka berwisata ke negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim (www.kompasiana.com/amirsyahoke/---/memahami-penolakan-wacana-halal-tourism-di-bali?page=all).

Menanggapi gagasan pengembangan pariwisata halal di Bali, I Wayan Nuka Lantara, staf pengajar FEB UGM, Yogyakarta, memberikan pendapatnya. Menurutnya, paling tidak ada dua argumen besar yang mendasari ide tersebut.

Pertama, kesuksesan wisata Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, yang dikenal toleran dan sesuai (ramah) terhadap wisatawan mancanegara dengan latar belakang budaya masing-masing yang berbeda-beda, termasuk untuk wisatawan dari negara-negara Timur Tengah. *Kedua*, beberapa negara lain seperti Thailand dan Jepang juga sudah membuka diri sebagai destinasi wisata halal, dengan menyediakan layanan dan infrastruktur yang sesuai dengan syarat-syarat objek wisata halal. Di samping itu, pusat investasi berbasis syariah yang perkembangannya bahkan mengalahkan potensi di negara-negara pusat bisnis syariah di Timur Tengah, justru adalah London (Inggris) dan Malaysia. Mestinya Bali juga bisa meniru upaya tersebut.

Tabel 4.3

Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang
Menurut Bulan dan Kelas Hotel di Bali, 2018

Bulan	Kelas Hotel					Seluruh Kelas Hotel
	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1	
1. Januari	54,26	57,72	47,82	49,87	37,02	52,97
2. Pebruari	71,31	72,97	59,23	56,31	48,20	66,66
3. Maret	61,82	64,95	54,73	69,61	43,12	61,19
4. April	63,67	68,11	59,39	62,21	45,71	63,53
5. Mei	64,75	72,05	66,69	68,15	52,08	67,55
6. Juni	73,35	77,62	59,88	67,91	47,64	70,32
7. Juli	73,30	80,10	65,49	84,05	53,26	74,40
8. Agustus	76,95	79,18	69,01	64,22	55,26	73,83
9. September	73,64	74,70	64,92	60,29	47,22	69,52
10. Oktober	73,18	72,17	63,43	56,61	49,31	68,06
11. Nopember	54,81	62,19	52,18	51,17	37,61	55,92
12. Desember	56,45	61,15	55,96	56,30	45,60	57,62

Rata-rata	66,46	70,24	59,89	62,23	46,84	65,13
2014	64,79	67,87	59,05	60,96	51,68	64,24
2015	64,47	66,52	56,13	47,60	48,05	61,75
2016	62,95	62,37	55,12	47,55	44,70	60,48
2017	61,46	61,83	58,67	54,22	53,15	60,31

Sumber: Survei Hotel Bulanan (VHTS), BPS Provinsi Bali, 2019

Namun demikian, lanjut Wayan Nuka, dalam kenyataannya, gagasan tersebut justru sebagian besar memperoleh penolakan dari masyarakat dan pelaku pariwisata di Bali dengan argumen-argumen yang cukup kuat pula. *Pertama*, Bali selama ini dikenal dengan wisata alam dan budaya “khas Bali” dengan keunikannya sendiri yang justru menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali terus meningkat, begitu juga dengan tingkat hunian kamar hotel (*lihat:* Tabel 4.2 dan 4.3). Dengan capaian yang cukup baik seperti ini, terbukti bahwa Bali tetap menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Jadi, mengapa harus diubah?

Kedua, dalam ilmu pemasaran paling dasar, dikenal istilah S-T-P (*segmenting, targeting, dan positioning*). Populasi yang beragam dipecah-pecah menjadi berbagai segmen sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing (*segmenting*), lalu dipilah dan dipilih lagi segmen-segmen yang dianggap paling potensial untuk dijadikan target (*targeting*), dan selanjutnya disusun program pemasaran sesuai kesan yang ingin diciptakan di benak segmen yang dijadikan target (*positioning*). Pertanyaannya, jika selama ini *positioning* wisata Bali sudah terbukti sukses dengan proses pencarian dalam sejarah panjangnya, mengapa harus diubah lagi?

Ketiga, salah satu upaya utama pemerintahan Jokowi adalah menambah pilihan destinasi pariwisata, dengan cara membuka destinasi-destinasi wisata baru dengan keunikannya masing-masing, sehingga menambah pilihan bagi para wisatawan domestik dan mancanegara, dengan pembenahan objek wisata, perbaikan akses transportasi, akomodasi, dan komunikasi. Saat ini, yang dibutuhkan justru adalah ekstensifikasi destinasi wisata baru di berbagai daerah di Indonesia, bukan intensifikasi destinasi wisata yang sudah terbukti mengalami pertumbuhan. Bukankah sudah ada destinasi yang memang mengambil *positioning* wisata halal seperti di Lombok (NTB), atau beberapa daerah lain yang lebih cocok seperti Aceh atau Sumatera Barat misalnya, yang jika serius digarap justru akan memberi dampak yang lebih signifikan.

Keempat, menjadikan Bali sebagai wisata halal juga membutuhkan upaya yang serius. Pada dasarnya, wisata halal disusun dengan dua pendekatan utama, *negative screening* maupun *positive screening*. Negative screening bisa diartikan bahwa wisata halal seharusnya didukung upaya menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip halal. Sedangkan positive screening bisa diartikan harus dibangun daerah khusus yang sesuai dengan syarat wisata halal, seperti hotel khusus syariah, restoran dan tempat wisata halal, penyediaan SDM yang sesuai dan seterusnya. Dengan berbagai argumen tersebut, masih perlukah Bali memosisikan dirinya menjadi destinasi wisata halal, dengan segala konsekuensi ekonomi dan budaya yang nantinya akan muncul? Sudahkah dilakukan kajian *cost-benefit* yang menunjukkan bahwa manfaat lebih banyak dibanding ongkos (moneter dan non-

meneter) yang muncul jika Bali diubah menjadi destinasi wisata halal, pada saat daerah lainnya justru lebih berpotensi diubah atau malah sudah mendeklarasikan positioning sebagai destinasi wisata halal? (www.balipost.com/news/2019/03/04/70095/Perlukah-Pariwisata-Halal-di-Bali.html)

Tersirat dalam wawancara dengan Ida Bagus Adi Laksana, Kabid Pengembangan dan Destinasi Wisata Provinsi Bali, bahwa pengembangan wisata halal di Bali akan terbentur dengan “identitas Bali” yang selama ini dikenal sebagai tempat yang didiami dan didatangi masyarakat dari berbagai kalangan. Jika digaungkan tentang wisata halal di Bali, ada kekhawatiran wisatawan asing tidak ada yang datang. Karena tujuan mereka ke Bali bukan untuk itu, dan selama ini mereka mengenal Bali dengan wisata budaya dan keindahan alamnya.

Namun demikian, ungkap Adi Laksana, pengembangan bisnis pariwisata di Pulau Bali berasal dari masyarakat (*bottom up*). Sejak jaman dulu, masyarakatlah yang berinisiatif untuk mengembangkan bisnis kepariwisataan tersebut (termasuk perluasannya dalam penyediaan layanan wisata halal). Adi Laksana memberikan contoh tentang restoran-restoran halal, rumah makan padang dan sarana ibadah di beberapa rumah makan, dengan sangat mudah dapat dijumpai oleh wisatawan Muslim.

Pernyataan Adi Laksana di atas dikuatkan oleh Ana Maryana, Sekretaris ASITA Provinsi Bali. Dalam wawancara, Ana menuturkan bahwa konsep wisata halal selama ini dipersepsi secara kaku (sehingga memunculkan kesalah-pengertian). Padahal Bali selama ini terbuka untuk semua kalangan, termasuk wisatawan Muslim

dari *Middle East* atau negara Muslim lainnya. Di Bali dengan mudah dapat ditemukan destinasi-destinasi ramah Muslim atau rumah makan yang halal. Hotel-hotel yang tidak mencantumkan konsep halal pun, di tiap-tiap kamarnya banyak yang mencantumkan tanda arah kiblat. Begitupun dengan *travel agent* yang melayani perjalanan wisatawan Muslim. Para pelaku bisnis itu kebanyakan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, dan mereka kebanyakan Muslim juga, sehingga sudah terbiasa melayani kebutuhan-kebutuhan *client* mereka, termasuk wisatawan Muslim.

Kondisi seperti itu berkembang secara alami, karena sejak dahulu masyarakat Bali tidak bisa dilepaskan dari pariwisata, begitupun dengan perkembangannya saat ini. Hal ini berbeda dengan di tempat lain, Lombok misalnya. Ana mengatakan, kalau di Lombok wisata halal itu sengaja dibuat (pemerintah), dan para investor yang hendak mengembangkan bisnis wisatanya di pulau Lombok menyesuaikan dengan konsep wisata yang dikembangkan pemerintah setempat. Sementara itu, masyarakat di Lombok belum begitu memahami tentang program tersebut.

Selama wawancara dengan Ana Maryana, tersirat adanya “kecurigaan” bahwa gembar-gembornya wisata halal di Bali saat ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan persaingan bisnis. Dengan keterkenalan Bali sebagai destinasi utama pariwisata, ramai dikunjungi wisatawan mancanegara, maka persaingan bisnis pariwisata di Bali sangat ketat. Padahal menurutnya, wisatawan dari *Middle East* sekalipun yang datang ke Bali tidak bertujuan untuk itu. Ramainya wacana tentang pengembangan wisata halal di Bali, menurut Ana, hanya terjadi “di luar”, karena para pelaku bisnis sendiri tidak terlalu memusingkan tentang hal itu.

4.3 Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim di Bali

4.3.1 Konsep Pariwisata Ramah Muslim di Bali

Sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia yang sudah dikenal wisatawan mancanegara, perkembangan industri pariwisata Bali sudah dipastikan menyesuaikan diri dengan perkembangan pariwisata global. Tanpa menghilangkan ciri khas wisata budaya yang ditawarkannya, kepariwisataan di Bali juga responsif terhadap tuntutan-tuntutan kebutuhan para wisatawan dari berbagai kalangan, termasuk wisatawan Muslim. Seiring *boomingnya global halal tourism*, bermunculan hotel- hotel dan restoran yang mengusung konsep halal di Bali.

Sebagaimana dikatakan Yuniartha, Kepala Dinas Kepariwisata Provinsi Bali, bahwa Bali menerima siapa pun yang datang ke Bali dan menyediakan apa pun yang mereka cari. Untuk wisatawan Muslim sendiri, di Bali terdapat ratusan restoran-restoran halal, juga hotel-hotel yang berkonsep halal (republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/17/04/04...). Tumbuhnya industri wisata di Bali, seperti terungkap dalam hasil wawancara dengan Adi Laksana dan Ana Maryana pada bagian di atas, berjalan secara alamiah selaras dengan perkembangan kepariwisataan di Bali sendiri yang sudah berlangsung sejak lama. Begitu pula dengan kepariwisataan yang ramah Muslim, seperti agen-agen perjalanan, rumah makan, sarana ibadah, dan pusat-pusat perbelanjaan, mereka tumbuh seiring meningkatnya wisatawan Muslim yang datang ke Bali.

Perkembangan tersebut terjadi secara wajar sebagai tanggapan atas tuntutan pasar, bukan karena dipaksakan oleh pemerintah karena adanya pergeseran konsep

pariwisata yang dikembangkan. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menunjukkan kapan obyek-obyek wisata ramah Muslim itu mulai berkembang, juga sejauh mana perkembangannya selama ini. Apalagi jika dikaitkan dengan kesiapan Bali sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia.

Wisata halal atau yang diperhalus menjadi pariwisata ramah Muslim (PRM) sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi kepariwisataan di Indonesia. Ditegaskan oleh Anang Sutono, Ketua Tim Percepatan Wisata Ramah Muslim, PRM adalah *life style* atau gaya hidup, tidak ada bedanya dengan gaya hidup sehat atau vegetarian. Bagi dunia pariwisata sendiri, ia tidak ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan.

Pariwisata ramah Muslim intinya adalah 2 hal: yaitu *customer service* atau layanan bagi wisatawan terkait dengan makanan atau kuliner yang halal dan penyediaan fasilitas ibadah, seperti masjid, mushala, arah kiblat, tempat wudhu, dan sebagainya. Ia adalah *branding* dalam strategi promosi untuk destinasi tertentu. Tujuan utamanya adalah menghadirkan wisatawan, menambah *market share* baru, menambah fitur baru, mengoptimalkan opsi baru, atau *extended product*, yang memang ada pasarnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, secara faktual, hampir semua daerah dan destinsi di Indonesia, sudah punya restoran halal dan fasilitas ibadah. Bagi wisatawan Nusantara, mereka sudah memahami bahwa di mana saja di seluruh Indonesia penuh toleransi dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan, mereka tidak akan kesulitan untuk menemukan tempat makanan

halal dan tempat ibadah (liputan6.com/news, 05/09/2019). Hal demikian juga ditemukan di berbagai tempat di Bali.

I Gde Pitana Brahmananda, Guru Besar Universitas Udayana Bali, membenarkan bahwa pengembangan pariwisata ramah Muslim itu sama halnya dengan pengembangan wisata kuliner, vegetarian, dan sejenisnya sebagai *extended product* yang berorientasi ke pasar. Menurutnya, hal pertama yang dicari wisatawan adalah destinasi terbaik seperti Bali atau Lombok. Di destinasi, para wisatawan akan mencari segala sesuatu sesuai kebutuhan mereka. Bagi wisatawan Muslim yang butuh makanan halal sesuai dengan keyakinan mereka, maka disiapkan makanan yang halal.

Pitana mencontohkan saat Raja Salman Arab Saudi dan rombongan berkunjung ke Bali. Mereka bukan mencari pariwisata halal, tetapi mencari Bali sebagai destinasi. Di Bali, Raja Salman membutuhkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan keyakinannya, seperti makanan yang halal, tempat ibadah, dan produk-produk halal lainnya. Dengan kenyataan itu, tidak menjadikan Bali sebagai Destinasi Pariwisata Halal, namun Bali memiliki *extended product* berupa pariwisata halal. ((liputan6.com/news, 05/09/2019).

Dalam suatu wawancara dengan sebuah media, Rainier H. Daulay, pemilik hotel The Rhadana Kuta Bali, hotel yang mengusung konsep halal, mengatakan bahwa halal itu pilihan, kesempatan bisnis, dan halal itu sehat. Dengan demikian tidak perlu adanya zonasi atau dikotak-kotakkan. Konsep halal yang diusung pada hakekatnya merupakan layanan untuk mempermudah segala kebutuhan wisatawan Muslim, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang jumlahnya

cukup besar. Pelayanan ini akan menambah peluang bisnis dan memperbesar pangsa pasar, bukan sebaliknya mengurangi jumlah kunjungan (nasional.sindonews, 05/03/2019).

4.3.2 Destinasi Wisata Ramah Muslim di Bali

1. Hotel dan Restoran dengan Konsep Halal di Bali

a. The Rhadana Kuta

Pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata telah resmi mengumumkan pemenang Kompetisi Pariwisata Halal Nasional yang terbagi dalam 15 kategori. Pada kesempatan itu, untuk kategori *World's Best Family Friendly Hotel* (Hotel Keluarga Ramah Wisatawan Muslim Terbaik) dimenangkan oleh salah satu hotel di Bali, yaitu The Rhadana Kuta, yang merupakan *thematic boutique hotel* sekaligus hotel muslim modern pertama yang mengantongi sertifikat halal MUI di Bali.

Hotel Rhadana di Kuta Bali yang dikelola berdasarkan konsep halal untuk para pelanggannya mendapatkan *award* dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai *The Leading Muslim Friendly Hotel* di Indonesia pada perayaan Ulang Tahun PHRI ke 50. Berlokasi di Jalan Raya Kuta 88R, hotel yang dibangun sejak tahun 2012 ini memiliki kamar-kamar tematik yang unik, mulai dari tema musisi dunia, obyek wisata, hingga tema hobi seperti sepeda gunung.

Gambar 4.7

Hotel The Rhadana Kuta



Sumber foto: *au.trip.com*

Keunikan lain dari hotel bintang empat yang dikembangkan oleh Rhadana Hospitality Development ini; yaitu menjadi hotel *Muslim friendly* modern pertama dengan sertifikat MUI. Di masing-masing kamar pun ada Al-Quran dengan tiga bahasa, sajadah, mukena, dan sarung. Di samping itu, juga tersedia musala yang cukup luas dengan gambar Ka'bah. Hotel ini memiliki restoran Café de Dapoer, restoran dengan dekorasi kayu yang *homey* dengan dapur terbuka tempo dulu. Restoran ini menyajikan menu halal Indonesia dan *Western*.

Gambar 4.8

Cafe dé Dapoer di The Rhadana Kuta



Sumber foto: *indonesia.tripcanvas.co*

b. Hotel dan Restoran Bayt Kaboki

Bayt Kaboki dibangun pada 2013, sebagai hotel pertama yang mengusung konsep syari'ah atau halal di Bali. Bayt Kaboki Hotel sangat menghargai pentingnya institusi keluarga, sehingga hanya mengizinkan mereka yang terikat hubungan pernikahan atau keluarga untuk menginap. Karenanya, hotel ini mengutamakan terciptanya lingkungan yang baik, asri, tenang dan kondusif agar dapat menjadi rumah kedua bagi seluruh anggota keluarga.

Gambar 4.9
Bayt Kaboki Hotel



Sumber foto: *hotelscombined.ae*

Hotel syariah di Bali ini menawarkan lokasi yang cukup strategis, di alamat Jl. Griya Anyar Nomor 27, Kuta. Lokasi tersebut bisa menjangkau Bandara Internasional Ngurah Rai dalam waktu sekitar 15 menit, berjarak hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari Mall Bali Galleria. Selain itu, akses ke Pantai Kuta juga dapat dilakukan dengan berkendara sekitar 15 menit. Sementara itu, deretan kafe serta tempat makan yang enak di Seminyak, bisa didatangi cukup dengan berkendara sekitar 20 menit (www.kintamani.id)

Sebagai hotel keluarga, Bayt Kaboki tidak menyediakan maupun mengizinkan minuman beralkohol. Menu makanan dipilihkan dari sumber yang baik dan terjamin

kehalalannya (<http://baytkabokihotel.com/>). Di bagian belakang hotel terdapat mushala yang dilengkapi dengan tempat wudhu yang cukup bersih.

Gambar 4.10

Mushala di Bayt Kaboki Hotel



Sumber foto: koleksi pribadi.

c. Nusa Dua Beach Hotel & Spa

Nusa Dua Beach Hotel & Spa merupakan salah satu resor perintis Nusa Dua. Hotel ini mempertahankan sebagian besar pesona klasik Bali melalui arsitektur dan fasilitas yang mengagumkan. Hotel ini memiliki 7 pilihan lokasi makan, berupa restoran dan bar, sehingga wisatawan bisa menyesuaikan tempat makan dengan selera masing-masing. Di samping itu, secara khusus, Tamarind Mediterranean Brasserie

serta Raja's Balinese Restaurant merupakan dua restoran bersertifikat halal MUI. Masing-masing menyediakan menu kontemporer serta makanan tradisional Bali.

Gambar 4.11

Bali Nusa Dua Hotel



Sumber foto: *pulaugroup.co.id*

Nusa Dua Beach menyediakan mushalla yang terdapat di bagian basemant. Hotel ini merupakan hotel tepi pantai yang menyediakan akses pantai secara langsung kepada para tamunya. Bahkan, garis pantai di hotel ini cukup panjang, mencapai 200 meter dan selalu terjaga kebersihannya. Hotel mewah ini berlokasi strategis di Kawasan Pariwisata Nusa Dua. Dari lokasinya itu, beragam tempat wisata bisa dikunjungi dengan sangat mudah (www.kintamani.id).

Terdapat sejumlah hotel lain di Bali yang juga menawarkan menu halal di salah satu atau beberapa restoran yang mereka miliki. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan fasilitas mushalla yang cukup nyaman. Namun secara umum, di setiap kamar hotel tersebut sudah disediakan terdapat petunjuk arah kiblat, juga kita dapat meminta peralatan shalat seperti sajadah. Hotel-hotel tersebut antara lain: Grand Zuri Kuta Bali, Wina Holiday Villa, Plagoo Holiday Hotel, Hotel Aston Denpasar, Grand Santhi Hotel, The Harmony Legian Hotel, B Hotel Bali & Spa, Bhuwana Ubud Hotel, dan The Oasis Lagoon, Sanur.

2. Masjid-masjid di Bali

Masjid atau sarana umat Islam untuk melaksanakan shalat, sekalipun tidak sebanyak sebagaimana yang ditemui di tempat-tempat lain, namun di setiap wilayah yang jumlah umat Islamnya banyak, bangunan itu akan selalu ditemui. Masjid-masjid tersebut sebagiannya dibangun menyusul terbentuknya komunitas-komunitas Muslim baru yang berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mencari penghidupan di Bali. Sebagian lainnya bahkan sudah dibangun sejak berabad-abad yang lalu seiring dengan penyebaran Islam di Pulau Bali.

Menurut catatan sejarah, masuknya Islam ke Pulau Bali sejaman dengan penyebaran Islam di Nusantara pada umumnya. Dalam bukunya *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, Dhurorudin Mashad (Pamungkas, dalam historia.id/agama/articles) mengatakan bahwa masuknya Islam ke Bali sudah terjadi sejak abad ke-14. Pada saat itu, Raja Majapahit mengutus sekitar 40 orang prajuritnya

untuk mengantar Dalem Ngalesir dari Kerajaan Gelgel pulang kembali ke tanah airnya di Bali setelah kunjungan diplomatisnya ke Majapahit. Para prajurit tersebut yang seluruhnya beragama Islam, tidak kembali ke Majapahit tetapi tinggal menetap menjadi penduduk di Gelgel. Mereka akhirnya menjadi komunitas Islam awal di Bali yang beranak-pinak hingga hari ini.

Dengan memahami realitas sejarah di atas, maka kita dapat memaklumi bahwa masyarakat Islam sudah menjadi bagian dari Bali sejak lama, dan dapat dipastikan bahwa keberadaan masjid-masjid di Bali dibangun seiring dengan tumbuhnya komunitas-komunitas itu. Masjid-masjid itu pula yang menjadi sarana yang digunakan para wisatawan Muslim untuk menjalankan kewajibannya pada saat mereka mengunjungi tempat-tempat di mana komunitas-komunitas itu berada. Seiring perkembangan kepariwisataan Bali, dapat dipastikan pula bahwa komunitas-komunitas Muslim itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari geliatnya. Contoh yang paling nyata adalah dijadikannya perkampungan-perkampungan Muslim di Bali sebagai bagian dari destinasi yang ditawarkan kepada para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Beberapa dari masjid-masjid yang tersebar di Bali disebutkan di bawah ini.

a. Masjid Nurul Huda, Tuban

Masjid Nurul Huda berada di kompleks Bandara Internasional, Ngurah Rai, Kuta, Bali. Tepatnya di Jalan Sentani No. 3, Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung. Masjid ini diapit oleh bangunan Pura di sebelah utara dan Gereja di

sebelah selatannya. Ia menjadi bukti kerukunan dalam harmoni hidup antar-umat beragama bisa tercipta meski banyak perbedaan. Dari cerita beberapa tokoh Muslim yang mengenal sejarah berdirinya masjid itu, Tahun 1970 almarhum Hertoko, Kepala Penerbangan Sipil yang kini dikenal dengan Angkasa Pura I Ngurah Rai, memiliki gagasan membangun masjid di kompleks bandara berdampingan dengan tempat ibadah umat lain. Gagasan itu didukung warga Muslim saat itu.

Gambar 4.12

Masjid Nurul Huda, Tuban, Kuta-Bali



Sumber foto: *lifestyle.okezone.com*

Sampai akhir 1971, Masjid Nurul Huda bisa berdiri meski dengan bangunan sederhana dengan atas sirap seluas 10x10 meter ditambah bangunan dan areal lain menjadi 1.100 meter persegi. Pemberian nama Nurul Huda yang berarti cahaya

petunjuk, tak lepas dari keberadaanya di bandara. Dalam istilah penerbangan ada lampu petunjuk yang sangat dibutuhkan oleh pesawat yang akan mendarat. Demikian pula cahaya petunjuk yang dipakai sebagai nama Masjid Nurul Huda. Maksudnya, bisa memberi cahaya penerang bagi warga Muslim untuk menemukan kebenaran atau kebaikan.

Perlahan masjid itu berkembang terlebih dengan kehadiran Muslim asal Makassar, Sulawesi Selatan. Selain warga sekitar, para musafir atau penumpang pesawat, menyempatkan diri salat di Masjid Nurul Huda. Dalam perkembangannya, masjid tersebut telah beberapa kali mengalami renovasi hingga berdiri kokoh dengan dua lantai ditambah kubah besar. Selain mendapat sumbangan rutin dari PT Angkasa Pura I sebesar Rp20 juta per tahun, banyak sumbangan dari warga Muslim yang datang saat salat.

Masjid ini juga dirancang dengan konsep terbuka. Keberadaan dinding hanya ada pada ruang-ruang penunjang. Meski tidak dapat dipungkiri polusi suara dari aktivitas terbang – landas masih sangat mengganggu sebagai konsekuensinya. Namun demikian keberadaan pepohonan besar di area parkir yang cukup rindang cukup mampu mengurangi suhu kawasan bandara yang sangat tinggi.

Hal yang menarik, karena masing-masing tempat ibadah memiliki kegiatan yang acap kali waktunya bersamaan, namun itu bukan menjadi masalah. Sebab di antara pemuka agama terus mengembangkan budaya dan semangat toleransi. Hingga berlalu 40 tahun, tidak pernah ada masalah terkait perbedaan agama di antara warga

yang tempat ibadahnya disatukan dalam kompleks tersebut (lifestyle.okezone.com, 2011/08/25).

b. Masjid Agung Ibnu Batutah.

Masjid Agung Ibnu batutah merupakan bagian dari simbol-simbol kerukunan tempat ibadah dari Nusa Dua Bali. Masjid ini berdiri dengan megah di pelataran bukit Kampial Nusa Dua, berdiri berdampingan dengan empat sarana ibadah umat beragama lain, yakni Pura Jagat Natha bagi umat Hindu, Vihara Budina Ghuna untuk umat Buddha, dan Gereja Bunda Maria Segala Bangsa untuk umat Katolik serta Gereja Kristen Bukit Doa untuk umat Protestan.

Gambar 4.13

Masjid Agung Ibnu Batutah, Puja Mandala



Sumber foto: *balimuslim.com*

Lokasi ini dikenal dengan nama kompleks peribadatan Puja Mandala di Nusa Dua, Bali. Berawal dari keinginan umat Islam untuk mendirikan masjid di Nusa Dua. Namun, karena izin sulit didapatkan dengan alasan tidak memenuhi syarat pendirian bangunan ibadah yang harus mempunyai 500 KK, akhirnya keinginan itu belum dapat dilaksanakan. Pihak MUI bersama Yayasan Ibnu Batutah kemudian datang ke Jakarta untuk meminta persetujuan. Akhirnya, ada inisiatif dari Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, yang saat itu dijabat oleh Joop Ave, untuk membangun tempat ibadah kelima agama di satu kompleks. Ide ini didapat atas dasar keinginan presiden Soeharto yang menginginkan adanya tempat ibadah kelima agama yang berdiri di satu tempat. Pihak PT. BTDC lalu menghibahkan bantuan berupa tanah untuk membangun kelima tempat ibadah tersebut. Tanah itu dibagi sama besar dan luasnya. Sedangkan untuk pendirian bangunan diserahkan sepenuhnya kepada umat masing-masing agama, dengan aturan pendirian bangunan tersebut harus sama tingginya.

Puja Mandala Nusa Dua mulai dibangun tahun 1994. Tahun 1997, Puja Mandala Nusa Dua secara resmi disahkan oleh Menteri Agama Bapak Tarmidzi Taher. Saat itu hanya ada Gereja Katolik Bunda Maria Segala Bangsa, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa dan Masjid Ibnu Batutah yang sudah selesai pembangunannya. Wihara Budhina Guna (Budha) baru selesai pembangunannya pada tahun 2003. Sementara itu, proses pembangunan Pura Jagat Natha baru dirampungkan beberapa sesudahnya.

Masjid Agung Ibnu Batutah adalah salah satu dari sedikitnya masjid yang ada di Pulau Bali. Oleh karena itu, tak heran masjid ini begitu ramai dipadati jamaah yang akan beribadah. Bangunan masjid yang begitu besar dengan berhiaskan atap limas, membuatnya tampak begitu menonjol dan terlihat jelas meski dari kejauhan. Berdiri dengan dua lantai, Masjid Agung Ibnu Batutah pun menjadi pusat kegiatan umat Islam di Pulau Bali. Di lantai satu terdapat ruangan bawah masjid yang dijadikan sebagai tempat kegiatan, seperti Taman Pendidikan Al-Quran, dan pengumpulan zakat. Sedangkan ruang utama masjid terletak di lantai dua.

Kesan sederhana langsung terpancar begitu Anda tiba di ruangan ini. Lantainya yang berwarna abu-abu tampak cantik ketika dipadukan dengan dinding yang dilapisi keramik abu-abu tua. Menengok ke mihrab, keanggunan langsung terasa lewat desainnya yang minimalis. Yang menambah anggun adalah berbagai koleksi antik milik masjid, seperti bedug lama dan Al-Quran yang ditulis tangan.

c. Masjid Agung Palapa

Masjid Agung Palapa berada di kawasan resort megah yang konon dibangun dan dimiliki oleh Tomy Soeharto. Lokasi Masjid ini sendiri yaitu di Dreamland Bali, Jalan Pecatu Indah Resort, Pecatu Bali, Kuta Selatan. Arsitektur masjid ini terbilang sangat megah untuk ukuran masjid di Bali. Bahkan jika dibandingkan dengan masjid masjid di tanah Jawa, Masjid Agung Palapa ini masih tergolong megah. Mengusung konsep bangunan yang beratap mirip masjid agung seperti di Jawa dengan atap limas, fasilitas masjid ini juga sangat lengkap mulai dari penyediaan air wudhu baik di

belakang, samping dan bagian depan. Sehingga jamaah yang baru datang dan terlambat waktu sholat tak perlu lagi harus ke bagian belakang untuk mengambil air wudhu tapi cukup berwudhu di bagian depan. Masjid ini menjadi alternative sarana ibadah bagi wisatawan yang sedang berkunjung di daerah Selatan Bali, khususnya di kawasan Garuda Wishnu Kencana (GWK), Ungasan dan Uluwatu

Gambar 4.14

Masjid Agung Palapa di Kawasan Dreamland Beach



Sumber foto: *idntimes.com*

Pengelolaan masjid ini tampaknya juga sudah sangat baik terlihat dari kelengkapan alat sholat berupa mukena yang bersih, sarung, sajadah, Al-Quran dan beberapa buku agama pendukung lainnya. Kondisi kamar mandi pun tidak kalah

bersihnya. Sehingga kehadiran masjid ini sangat membantu para wisatawan yang sedang berada di Bali terutama kawasan Dreamland. Keramah-tamahan pengurus masjid pada para pengunjung sangat tampak dengan senyuman dan jabat tangan erat sebagai tanda sebuah persaudaraan sesama muslim (melumlaku.wordpress.com/2016/05/20).

d. Masjid Al-Qomar Denpasar

Masjid Al Qomar di Denpasar dibangun di atas lahan seluas 5,9 are dengan luas bangunan 3,5 are, Masjid Al Qomar tampak megah nan artistik. Arsitektur masjid lekat dengan nuansa Bali, yang menyimbolkan harmonisasi hubungan antarumat beragama di Pulau Dewata. Masjid Al-Qomar berada di ujung Jalan Pura Demak Banjar Buagan, Denpasar Barat, Kota Denpasar. Masjid ini awalnya sebuah mushalla kecil berukuran 5m x 5m. Kemudian warga ramai-ramai menghibahkan tanah mereka, sehingga luasnya mencapai 3,5 are dan akhirnya berkembang seperti sekarang.

Masjid kebanggaan warga Banjar Buagan ini dikenal dengan nama Masjid Demak, mengacu pada lokasi masjid, jalan Pura Demak. Kelihan Dinas Banjar Buagan, AA Made Sudarsana, pernah menuturkan bahwa nama Jalan Pura Demak sebagai simbol menyama braya, artinya hubungan yang harmonis antarumat beragama. Pura, identik dengan Hindu dan Demak identik dengan Islam. Di ujung selatan jalan Pura Demak ada Masjid Al Qomar dan di ujung utara ada Pura Pedemakan. Hubungan yang sangat erat antara warga yang berbeda agama terlihat

dari sikap Kelihan Dinas Banjar Buagan yang tidak suka dengan istilah warga pendatang untuk menyebut kehadiran warga Muslim yang memang pendatang. Menurutnya, semuanya adalah warga Buagan, karena pada awalnya di sini dulu sawah. Tidak ada yang benar-benar penduduk asli di sini.

Gambar 4.15

Masjid Al-Qomar, Simbol Menyama Braya Antarumat Beragama



Sumber foto: aboutbali.beritabali.com

Memasuki bulan suci Ramadhan, Masjid Al Qomar rutin mengadakan buka bersama setiap hari hingga hari terakhir bulan Ramadan. Panitia masjid menyediakan takjil gratis sebanyak 350 buah tiap harinya. Bukan hanya takjil, Masjid Al Qomar juga menyediakan nasi kotak lengkap dengan lauk pauk yang diperoleh dari

sumbangan warga sekitar masjid. Pada setiap Ramadan, Masjid Al Qomar juga rutin memberikan santunan pada yatim piatu, kaum duafa, dan fakir miskin pada 17 atau 21 Ramadan. Pemberian santunan muncul dari inisiatif warga sekitar yang sadar akan pentingnya makna berbagi. Pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, Masjid Al Qomar juga menggelar acara sahur bersama. Kegiatan sahur bersama diawali dengan kegiatan beriktikaf menyambut kehadiran malam yang istimewa, yaitu *Lailatul Qodar*.

3. Komunitas Muslim di Bali

Komunitas Muslim di Bali sudah terbentuk sejak lama. Mereka hidup rukun, damai, penuh toleransi, bahkan terjadi akulturasi, kawin silang, sehingga ada yang tadinya Hindu, kemudian menikah dengan orang Islam, sehingga Bali di kenal sebagai wilayah kondusif bagi kehidupan toleransi beragama. Komunitas-komunitas Muslim yang sudah berakar sejak lama, di beberapa wilayah di Bali, seperti di Klungkung, Buleleng, Nusa Penida, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Gianyar, Bangli, Badung-Denpasar, dan Lain-lain. Mereka tak hanya menjadi komunitas eksklusif, tetapi juga berinteraksi dan bergaul secara sosial dengan masyarakat Hindu di sekitarnya (Dhurrudin Mashad, 2014).

Pengungkapan komunitas Muslim di Bali dalam penelitian ini bertujuan: pertama, untuk menunjukkan bahwa Bali, sekalipun masyarakatnya secara mayoritas beragama Hindu, namun dalam kaitannya dengan perkembangan kepariwisataan, ia tidak dapat dipersamakan dengan negara-negara non-Muslim di tempat lain. Bagi negara-negara seperti Thailand, Jepang, atau Korea, penyediaan layanan untuk para

wisatawan Muslim yang datang ke tempat mereka merupakan layanan baru yang ditawarkan menyusul tumbuhnya *trend* pariwisata halal akhir-akhir ini. Sedangkan di Bali, kebutuhan-kebutuhan itu sudah tumbuh secara alami selaras dengan perkembangan umat Islam itu sendiri di wilayah ini.

Kedua, beberapa dari komunitas itu menjadi bagian dari destinasi yang ditawarkan dalam kepariwisataan di Bali. Hal ini terkait dengan keunikan budaya yang mereka miliki, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pariwisata budaya di Pulau Dewata tersebut. Selain keunikan budayanya, destinasi-destinasi itu juga kerap dijadikan obyek wisata sejarah, terutama terkait dengan perkembangan Islam di Nusantara.

a. Kampung Bugis Islam Pulau Serangan

Di Serangan terdapat Etnik Bugis Muslim yang sudah lama mendiami daerah tersebut dan hidup berdampingan dengan etnik Bali. Keberadaan etnik ini di Bali tidak bisa dilepaskan dari sejarah Bali secara umum, dan sejarah penyebaran Islam di Bali secara khusus. Etnik Bugis pada mulanya adalah para pemuda perantauan dari Bugis, Makassar yang merantau ke Bali karena tidak mau tunduk pada kebijakan VOC yang menjajah Sulawesi pada abad ke-17. Mereka meninggalkan kampung halamannya hingga ke Pulau Serangan, dan diberikan tempat oleh Raja Badung saat itu. Mereka juga ikut serta berperang melawan penjajah bersama para prajurit Puri Pemecutan Denpasar dalam perang Puputan Badung. Sejak saat itu, orang-orang

Bugis tersebut beranak-pinak dan membentuk komunitas di Sarangan sebagai salah satu saksi sejarah keberadaan agama Islam di Bali.

Sebagai saudara sebangsa yang sudah terjalin sejak lama, hubungan harmonis antara masyarakat Bugis Islam dengan etnik Bali Hindu pun mewarnai penduduk di Pulau tersebut. Mereka bahu-membahu tidak saja dalam masalah sosial, tetapi juga saling menghormati dan menjaga eksistensi agama masing-masing. Kedua etnis itu tidak sungkan untuk berbagi makanan saat perayaan hari besar agama, menjaga keamanan lingkungan saat salah satunya khidmat dalam upacara agama, bahkan ketika umat Islam merayakan Hari Raya Kurban, daging kurban tidak saja dibagikan kepada masyarakat beda agama, tetapi juga menghadiahkan daging kurban itu ke Puri Pemecutan (Cahyo Bintoro, 2017)

Gambar 4.16

Masjid Assyuhada Kampung Bugis Pulau Serangan





Sumber foto: *republika.co.id; situsbudaya.id; limakaki.com*

Di wilayah Serang dibangun Masjid Assyuhada sejak etnik Bugis menetap di sana. Masjid Assyuhada tidak saja menjadi sarana ibadah umat Islam pulau Serang, tetapi juga menjadi media kehidupan harmonis antar umat beragama di pulau tersebut. Masjid terlibat dalam pelestarian tradisi *ngejot*, yaitu tradisi memberikan makanan, jajanan atau buah-buahan kepada para tetangga sebagai rasa terima kasih. Biasanya *ngejot* dilakukan pada saat hari raya tertentu seperti Galungan, Nyepi, dan Ramadhan (Pramitha Shinta 2016:58, dalam Bintoro, 2017). Masjid Assyuhada juga memiliki Al-Quran kuno yang diwariskan turun temurun dan saat ini tersimpan dalam sebuah kotak kayu berkaca yang dibalut dengan kain putih. Alquran tua itu bertulis tangan, sampulnya dari kulit unta, ukurannya 40 x 20 cm. Kondisinya sudah agak rusak dan ada beberapa bagiannya yang terlepas (www.merdeka.com)

b. Kampung Kecicang, Karangasem.

Kampung Kecicang merupakan salah satu di antara sekitar 26 buah perkampungan Muslim di Kecamatan Karangasem. Di wilayah ini terdapat beberapa peninggalan sejarah Islam berupa Al-Qur'an kuno dan Kul-kul, yaitu penanda waktu shalat telah tiba atau adzan (Rahayu Arini, 2017). Masyarakat Islam di wilayah ini berasal dari etnis Lombok Sasak yang bermigrasi ke Karangasem pada saat ekspansi Kerajaan Karangasem hingga ke Pulau Lombok.(Mashad,2016 : 105, dalam Rahayu, 2017)

Kampung Muslim Kecicang adalah kampung Islam terbesar di Kabupaten Karangasem, Bali dengan penduduk mencapai 4.902 atau 950 KK. Penduduk Kampung Kecicang mempercayai bahwa leluhur mereka berasal dari penduduk kawasan Tohpati Buda Keling. Nama Kecicang sendiri diambil dari nama bunga berwarna putih yang biasa dimasak oleh masyarakat setempat. Nuansa Islami begitu kentara di kampung yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani itu. Salah satu bukti nyata eksistensi Islam di Kampung Kecicang adalah keberadaan Masjid Baiturrahman. Masjid yang telah berdiri sejak akhir abad 17 itu tak sekadar menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ikon dan identitas Muslim Kecicang.

Gambar 4.17

Masjid Baiturrahman, Kecicang, Karangasem-Bali



Sumber foto: *muslimbalitours.com*

Selain masjid, nuansa Islam di kampung ini dapat dirasakan melalui beragam tradisi kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Warga Kecicang memiliki tari-tarian khas bernama Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Timur Tengah. Mereka juga menjalankan tradisi ritual keagamaan seperti tahlil, ziarah, dan selamatan. Sebagaimana masyarakat Muslim di Bali lainnya, hubungan antara masyarakat Kecicang Islam dengan mayoritas penganut Hindu di Bali terjalin harmonis sejak lama. Keharmonisan ini dibuktikan saat pelaksanaan tradisi tahunan salat Idul Fitri, di mana sejumlah pecalang (polisi adat) turut serta membantu mengamankan hari raya umat Islam tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika umat

Hindu merayakan Nyepi, Muslim Kecicang turut pula menjaga keamanan dan memberi hadiah makanan (*ihategreenjello.com*)

c. Kampung Gelgel

Gambar 4.18

Masjid Nurul Huda Kampung Gelgel



Sumber foto: *kintamani.id*

Proses terbentuknya komunitas Islam di kampung Gelgel berawal dari kedatangan orang-orang Jawa utusan Hayam Wuruk, Raja Majapahit, yang ditugasi mengantarkan kembali Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460) setelah mengadakan konferensi kerajaan-kerajaan vasal (taklukan) di seluruh Nusantara di awal 1380an. Dalem Ketut Ngelesir diberi Prabu Hayam Wuruk 40 orang pengiring yang semuanya beragama Islam. Sesampainya di Bali, 40 orang pengiring ini diberi tempat atau hadiah yaitu di daerah Gelgel. Dari 40 pengiring ini ada yang kembali ke Jawa dan

ada yang menetap di Gelgel dan sampai saat ini. Di wilayah ini terdapat peninggalan sejarah berupa Masjid Nurul Huda, Babad, Tari Rudat, Pintu Menara, Mimbar, dan Makam (Dhurorudin Mashad, 2014:119 dalam Putu Adi Utama, 2015).

Jejak sejarah yang ada hingga kini adalah keberadaan Masjid Nurul Huda yang dibangun kurang lebih abad ke-14. Meskipun sudah berkali-kali di pugar, namun bentuk khasnya masih terlihat. Sebuah menara masjid yang ada di bagian kiri depan masjid masih berdiri gagah menjulang setinggi kurang lebih 17 meter. Masjid Nurul Huda menjadi pusat kegiatan keagamaan (www.kompasiana.com). Di samping itu, pada peringatan Maulid Nabi dipersembahkan “rudat”, yaitu sebuah seni tari oleh kelompok lelaki dengan iringan permainan rebana dan vokal.

Gambar 4.19

Kesenian Tari Rudat di Kampung Gelgel



Sumber foto: senimuslimbali-ind.weebly.com

Pada malam Maulid Nabi digelar pawai yang sangat meriah yang melibatkan hampir 40 orang lelaki berseragam gaya tentara, berbaris berjalan di jalan raya dengan diiringi irama rebana yang dinamis. Persembahan rudat itu dilakukan dengan gerakan gagah yang berdasarkan gerakan pencak silat, dengan formasi kelompok yang berubah-ubah melalui aba-aba peluit. Melihat tarian ini, kita akan membayangkan sosok leluhur mereka yang mengabdikan kepada Raja Klungkung sebagai tentara yang gagah berani pada zaman itu. Jika kita berkunjung ke Kampung Gelgel di bulan Ramadhan, banyak warung makan yang baru dibuka kurang lebih jam 5 sore. Di kampung Gelgel juga kita bisa temukan masyarakat yang menjual baju-baju Islami dan batik khas Bali, Endek.

Gambar 4.20

Kain Tenun Endek Khas Bali



Sumber foto: *kintamaniid-a903.kxcdn.com*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2 Pulau Bali, sebagai destinasi utama kepariwisataan di Indonesia, sudah berkembang sejak lama. Perjalanan panjang pariwisata Pulau Bali sudah lebih dari 100 tahun hingga saat ini. Daya tarik Bali terutama pada keindahan alam dan keunikan budaya masyarakatnya. Kekuatan tersebut, yang sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini, membuat Bali dikenal oleh wisatawan dunia, baik lokal maupun mancanegara. Kekuatan itu pula yang menjadi dasar bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menetapkan pengembangan kepariwisataan Bali dengan konsep Pariwisata Budaya, yaitu pariwisata yang menjadikan potensi budaya sebagai daya tarik utamanya. Pariwisata Budaya Bali berlandaskan pada nilai filosofis *Tri Hita Karana*, suatu pandangan hidup masyarakat yang didasarkan pada ajaran Hindu sebagai agama mayoritas bagi penduduk Bali. Pandangan hidup ini mengajarkan keharmonisan dalam tiga hubungan hidup manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Dengan dasar nilai filosofis ini, keluhuran budaya Bali tetap terjaga, hubungan harmonis antar beragam etnis dan agama terus dipertahankan, dan keseimbangan

alam dan lingkungan tetap terpelihara. Dengan nilai itu pula, pada akhirnya, kepariwisataan Bali terus berkembang.

2.2 Perkembangan kepariwisataan di Bali tidak bisa menutup diri dari isu-isu pariwisata global, termasuk isu pariwisata halal yang melanda pariwisata dunia akhir-akhir ini. Potensi keuntungan yang bisa didapatkan dengan membuka segmen pasar pariwisata halal seiring *halal life style* yang melanda masyarakat Muslim dunia, telah membuka wacana-wacana untuk menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia. Namun demikian, wacana-wacana itu ditolak oleh sebagian besar *stakeholder* kepariwisataan di Bali. Penolakan itu tidak didasarkan pada *sentiment* agama, tetapi lebih didasarkan kepada kepentingan bisnis jangka panjang. Pariwisata Budaya adalah *branding* kepariwisataan Bali yang sudah sangat dikenal wisatawan mancanegara, dan branding itu pula yang menjadikan Bali banyak dikunjungi dan tetap menjadi destinasi utama kepariwisataan di Indonesia. Ada kekhawatiran, jika konsep pariwisata Bali diganti, justru malah melemahkan kekuatan-kekuatan yang selama ini sudah dimiliki. Tujuan utama wisatawan adalah mengunjungi destinasi, bukan mencari obyek-obyek wisata halal.

3.2 Penolakan pada konsep pariwisata halal tidak berarti Bali tertutup bagi wisatawan Muslim. Pulau Bali terbuka untuk dikunjungi wisatawan dari mana pun dan apa pun agamanya, termasuk wisatawan yang beragama Islam. Dalam arti, kebutuhan-kebutuhan wisatawan Muslim yang berkunjung ke Bali dapat ditemukan di tempat ini. Hal itu karena industri pariwisata Bali dibesarkan oleh para pelaku bisnis pariwisata dari berbagai wilayah di Indonesia yang mencari peruntungan di Bali, termasuk di dalamnya umat Islam sebagai penganut agama mayoritas di Indonesia. Di samping

itu, sekalipun umat Hindu merupakan mayoritas, namun jumlah umat Islam pun banyak dan mereka tidak saja berasal dari pendatang, tetapi juga penduduk asli Bali yang sudah menetap turun temurun sejak lama, sezaman dengan penyebaran Islam di Nusantara. Seiring perkembangan kepariwisataan, umat Islam di Bali pun menjadi bagian di dalamnya, karena perkembangan kepariwisataan di Bali tumbuh secara alami (*bottom up*), bukan program yang direkayasa pemerintah (*top down*). Oleh karenanya, pada sisi ini, pariwisata di Bali bisa dikatakan sebagai Pariwisata Ramah Muslim (*Muslim friendly tourism*), karena pelayanan-pelayanan dasar untuk wisatawan Muslim, seperti makanan halal dan sarana ibadah (masjid), dengan mudah dapat ditemukan di Pulau Dewata tersebut.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian terapan nasional ini, penulis merumuskan rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut:

1. Konsep tentang pariwisata halal merupakan konsep baru, sehingga belum semua kalangan memahami makna konsep tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah, guna pengembangan pariwisata halal tersebut dipertegas terlebih dahulu tentang makna konsep itu, sehingga dapat dipahami dan dapat diikuti oleh masyarakat, terutama para *stakeholder* kepariwisataan.
2. Pengembangan konsep pariwisata halal di daerah tujuan wisata alangkah baiknya jika diterapkan di wilayah-wilayah yang memang memiliki potensi yang cukup besar untuk penerapan konsep tersebut, sehingga menjadi daya tarik utama dan menjadi

branding kepariwisataan daerah yang bersangkutan, sebagaimana halnya yang sudah dikembangkan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

3. Satu hal yang paling penting, yang menjadi tujuan utama para wisatawan berkunjung ke sebuah destinasi adalah destinasi itu sendiri. Daya tarik dari destinasi wisata, baik alam, keunikan budaya, maupun obyek-obyek buatan adalah yang mendorong mereka untuk berwisata. Oleh karena itu, pembangunan yang hendaknya lebih diutamakan adalah mengembangkan potensi-potensi daya tarik destinasi itu sendiri. Sekalipun dikemas dengan konsep wisata halal, wisatawan Muslim tidak akan datang ketika daya tariknya tidak ada. Karena tujuan seseorang untuk berwisata tidak sekedar mencari makanan halal atau mengunjungi masjid untuk shalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. 2017. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek, dalam *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 76237*, dimuat 17 January 2017
- Aminul Islam, Md & Kärkkäinen, L. 2013. “Islamic tourism as a prosperous phenomenon in Lapland.” *Thesis*. Rovaniemi University of Applied Sciences.
- Anom, I Putu, dkk. 2017. Turismemorfosis: Tahapan Selama Seratus Tahun Perkembangan dan Prediksi Pariwisata Bali, dalam I Nyoman Darma Putra dan Syamsul Alam Paturusi (Editor) *Metamorfosis Pariwisata Bali, Tantangan Membangun Pariwisata Berkelanjutan*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata. 2015. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*.
- Arini, Rahayu, dkk. 2017. Kampung Kecang Islam di Desa Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem, Bali (Latar Belakang Sejarah, Dinamika, dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA), dalam *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol 8. Nomor 2.
- Battour, M., & Ismail, M.N. 2015. “Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future.” *Tourism Management Perspectives*. Diakses melalui: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Bintoro, Cahyo, dkk. 2017. Masjid Assyuhada sebagai Media Pendidikan Multikultur di Kampung Bugis, Pulau Serangan, Denpasar, Bali, dalam *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol 8. Nomor 2.

- BPS Provinsi Bali. 2019. *Provinsi Bali dalam Angka*. Denpasar: Biro Pusat Statistik Provinsi Bali
- Geriya, W. 1995. *Pola Partisipasi dan Pemberdayaan Sumber Desa Adat dalam Perkembangan Pariwisata*. Denpasar : Upada Sastra
- Hutasoit, H. dan Redaktur Wau. 2017. Menuju Sustainability dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretatif pada Masyarakat Bali), dalam *Jurnal Manajemen*, Vol.13 No. 2. Hlm. 85-191.
- Jam'an Satori, dan Aan Komariah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- L. Somantri. t.t. *Keunggulan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan Indonesia*. Diakses pada 28/08/19 dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=rIRO5pwAAAAJ&hl=en>
- Moleong, L.J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Djakfar. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press
- Purana, I Made. 2016. Pelaksanaan Tri Hita Karana dalam Kehidupan Umat Hindu, dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, Maret 2016, FKIP Universitas Dwijendra, hlm. 67-76
- Putra, I Nyoman Darma dan Syamsul Alam Paturusi (Eds.). 2017. *Metamorfosis Pariwisata Bali, Tantangan Membangun Pariwisata Berkelanjutan*, Denpasar: Pustaka Larasan
- Riana, I Gusti, dkk. 2011. Dampak Penerapan Budaya Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar serta Konsekuensinya pada Kinerja Usaha (Studi pada Industri Kecil Menengah Kerajinan Perak di Bali), dalam *Jurnal aplikasi Manajemen*. Vol. 9. No. 2. Hlm. 601-610
- S. Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

- Sedra, I Made. 2016. Paradigma Kepariwisata Bali Tahun 1930-an: Studi Genealogi Kepariwisata Budaya, dalam *JURNAL KAJIAN BALI* Vol. 06, No. 02. Hlm 97-124
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan kelima, Bandung: Alfabeta
- Sutama, Putu adi, dkk. 2015. Komunitas Islam di Desa Gelgel, Klungkung, Bali, dalam *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol 3, No. 1
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup (*Heritage and Protection*) bagi Kepariwisata Budaya Bali